

**PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH,
TRANSPARANSI PUBLIK DAN AKTIVITAS
PENGENDALIAN TERHADAP AKUNTABILITAS
KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT**

TESIS

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Manajemen**



Oleh:

**J U M A R D I
2019.MM.1.2230**

**PROGRAM PASCA SARJANA
STIE NOBEL INDONESIA
MAKASSAR
2021**

**PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH,
TRANSPARANSI PUBLIK DAN AKTIVITAS
PENGENDALIAN TERHADAP AKUNTABILITAS
KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT**

TESIS

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Manajemen**



Oleh:

**J U M A R D I
2019.MM.1.2230**

**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
KONSENTRASI MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH**

**PROGRAM PASCA SARJANA
STIE NOBEL INDONESIA
MAKASSAR
2021**

PENGESAHAN TESIS**PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH,
TRANSPARANSI PUBLIK DAN AKTIVITAS PENGENDALIAN
TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN PADA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI
SULAWESI BARAT**

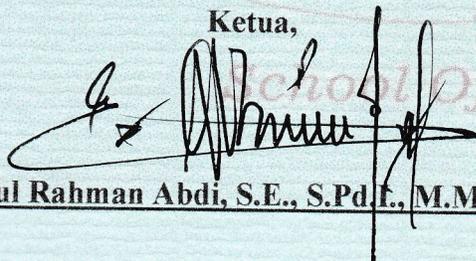
Oleh:

JUMARDI
2019.MM.1.2230Telah dipertahankan di depan penguji
Pada tanggal 31 Mei 2021
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui:

Komisi Pembimbing

Ketua,

Dr. Abdul Rahman Abdi, S.E., S.Pd.I., M.M., M.BA.

Anggota,

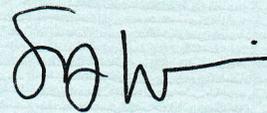
Dr. Abdul Khalik, S.E., M.Si.

Mengetahui:

Direktur PPS STIE Nobel Indonesia,

Dr. Maryadi, S.E., M.M.

Ketua Prodi Magister Manajemen,

Dr. Sylvia Sjarlis, S.E., M.Si., Ak., C.A.

HALAMAN IDENTITAS**MAHASISWA, PEMBIMBING DAN PENGUJI****JUDUL TESIS:**

***PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH,
TRANSPARANSI PUBLIK DAN AKTIVITAS PENGENDALIAN TERHADAP
AKUNTABILITAS KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT***

IDENTITAS MAHASISWA

Nama Mahasiswa : Jumardi
NIM : 2019MM12230
Program Studi : Magister Manajemen
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Daerah

KOMISI PEMBIMBING

Ketua : Dr. Abdul Rahman Abdi, S.E., S.Pd.I., M.M., M.BA.
Anggota : Dr. Abdul Khalik, S.E., M.Si.

TIM DOSEN PENGUJI

Dosen Penguji 1 : Dr. Maryadi, S.E., M.M.
Dosen Penguji 2 : Dr. Asri, S.Pd., M.Pd.
Tanggal Ujian : 31 Mei 2021
SK Penguji Nomor : 032/SK/PPS/STIE-NI/IV/2021

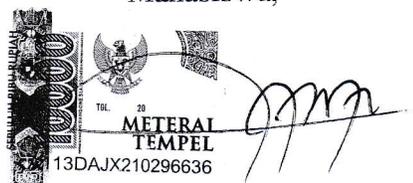
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sebenar benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan serta daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam Naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Tesis (MAGISTER MANAJEMEN) ini dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 2021

Mahasiswa,



Jumardi
2019MM12230

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur dihanturkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan berkah, rahmat dan karunia-Nya sehingga Tesis dengan judul **“Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik Dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat”** dapat diselesaikan. Tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Manajemen pada Program Studi Magister Manajemen Program Pascasarjana STIE Nobel Indonesia Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini banyak kekurangan-kekurangan dalam penulisan dan pembahasannya juga menyadari bahwa penulisan ini tidak akan tersusun tanpa bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini Penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. **Dr. H. Mashur Razak, S.E., M.M.** selaku Ketua STIE Nobel Indonesia Makassar.
2. **Dr. Maryadi, S.E., M.M.** selaku Direktur Pascasarjana STIE Nobel Indonesia Makassar.
3. **Dr. Sylvia Sjarlis, S.E., M.Si., Ak., C.A.** selaku Ketua Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana STIE Nobel Indonesia Makassar.
4. **Dr. Abdul Rahman Abdi, S.E., S.Pd.I., M.M., M.BA.** selaku Ketua Komisi Pembimbing, dan **Dr. Abdul Khalik, S.E., M.Si.** selaku anggota Komisi

Pembimbing yang telah bersedia membimbing, menyumbangkan masukan dan saran serta kritikan untuk kesempurnaan tesis ini.

5. Orang tua tercinta Ayahanda **Alm. Abdul Muis** dan Ibunda **Kuneng** serta keluarga tercinta yang senantiasa memberikan dukungan do'a, nasehat, dan motivasi yang diberikan selama kuliah sampai penulisan tesis ini sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
6. Bapak/Ibu Dosen, serta staf Program Pascasarjana Program Studi Manajemen STIE Nobel Indonesia Makassar, atas bantuan yang telah di berikan selama ini, kiranya akan menjadi bekal hidup dalam mengabdikan ilmu saya dikemudian hari.
7. Teman sejawat mahasiswa prodi Magister Manajemen PPs STIE Nobel Indonesia Makassar atas bantuan dan kerja samanya selama ini. Dan semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga senantiasa mendapatkan kebaikan dari-Nya atas bantuan yang diberikan hingga tesis ini terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari atas segala keterbatasan, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini dengan harapan, semoga tesis ini bermanfaat bagi pengambilan kebijakan di bidang manajemen dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi penelitian selanjutnya.
Amin.

Makassar, 2021
Penulis

Jumardi
2019MM12230

ABSTRAK

Jumardi. 2021. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, dibimbing oleh Abdul Rahman Abdi dan Abdul Khalik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis (1) pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik dan aktivitas pengendalian secara parsial dan simultan terhadap akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Sulawesi Barat (2) variabel yang berpengaruh dominan terhadap akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Sulawesi Barat.

Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian survey. Penelitian dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Waktu penelitian dilakukan mulai bulan Mei 2021 hingga bulan Juni 2021. Populasi penelitian adalah semua pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang berjumlah 215 orang. Penentuan sampel dalam penelitian ini sebanyak 68 orang pegawai didapat dengan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kelonggaran ketidak telitian ditetapkan sebesar 10%.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa (1) secara parsial variabel sistem akuntansi keuangan daerah dan aktivitas pengendalian berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat dengan $t_{hitung} = 4,214$ dan $4,788 > t_{tabel} = 1,997$, sedangkan variabel transparansi publik tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat dengan $t_{hitung} = -0,645 < t_{tabel} = 1,997$ (2) secara simultan variabel sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik dan aktivitas pengendalian berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat dimana $F_{hitung} = 27,488 > F_{tabel} = 2,75$ (3) variabel aktivitas pengendalian memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat dilihat dari nilai determinasi yang paling besar yaitu 0,462.

Kata kunci: *Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik, Aktivitas Pengendalian*



ABSTRACT

Jumardi. 2021. *The Effect of Regional Financial Accounting System, Public Transparency and Control Activities on Financial Accountability at the Regional Finance and Revenue Management Agency of West Sulawesi Province, supervised by Abdul Rahman Abdi and Abdul Khalik.*

This study aims to determine and analyze (1) the effect of the regional financial accounting system, public transparency and control activities partially and simultaneously on financial accountability at the Financial Management Agency of West Sulawesi Province (2) variables that have a dominant influence on financial accountability in the Financial Management Agency of West Sulawesi Province.

This research approach uses survey research. The research was conducted at the Regional Finance and Revenue Management Agency of West Sulawesi Province. The time of the study was carried out from May 2021 to June 2021. The research population was all employees of the Regional Finance and Revenue Management Agency of West Sulawesi Province, totaling 215 people. The determination of the sample in this study as many as 68 employees was obtained using the Slovin formula with the level of inaccuracy leeway set at 10%.

The test results show that (1) partially the regional financial accounting system variables and control activities have a significant positive effect on financial accountability at the Regional Finance and Revenue Management Agency of West Sulawesi Province with $t_{count} = 4.214$ and $4.788 > t_{table} = 1.997$, while the public transparency variable has no effect on financial accountability at the Regional Finance and Revenue Management Agency of West Sulawesi Province with $t_{count} = -0.645 < t_{table} = 1.997$ (2) simultaneously regional financial accounting system variables, public transparency and control activities have a significant positive effect on financial accountability at the Finance and Revenue Management Agency Region of West Sulawesi Province where $F_{count} = 27.488 > F_{table} = 2.75$ (3) control activity variable has the most dominant influence on financial accountability at the Regional Finance and Revenue Management Agency of Sulawesi Province the West seen from the value of the greatest determination that is 0.462.

Keywords: *Regional Financial Accounting System, Public Transparency, Control Activities*



DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PENGESAHAN TESIS	ii
HALAMAN IDENTITAS	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	10
2.2 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.....	14
2.3 Transparansi Publik.....	25
2.4 Aktivitas Pengendalian.....	27
2.5 Akuntabilitas Keuangan	29
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN	
3.1 Kerangka Konseptual	34
3.2 Hipotesis Penelitian.....	36
3.3 Definisi Operasional Variabel.....	36
BAB IV METODE PENELITIAN	
4.1 Pendekatan Penelitian	39
4.2 Tempat dan Waktu Penelitian	39
4.3 Populasi dan Sampel	40
4.3.1 Populasi.....	40
4.3.2 Sampel	40
4.4 Teknik Pengumpulan Data	41

4.5 Jenis dan Sumber Data	43
4.6 Metode Analisis Data	43
4.6.1 Uji Instrumen Penelitian	45
4.6.2 Uji Asumsi Klasik.....	46
4.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda	47
4.6.4 Uji Hipotesis	48

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian	53
5.1.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	53
5.1.2 Deskripsi Data	58
5.1.3 Deskripsi Responden	59
5.1.4 Deskripsi Variabel Penelitian	62
5.1.5 Analisis Statistik Deskriptif.....	78
5.1.6 Uji Instrumen Penelitian	80
5.1.7 Uji Asumsi Klasik.....	86
5.1.8 Analisis Regresi Linear Berganda	90
5.1.9 Uji Hipotesis	92
5.2 Pembahasan.....	98
5.2.1 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	98
5.2.2 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.....	99
5.2.3 Pengaruh Transparansi Publik terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.....	102
5.2.4 Pengaruh Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	104
5.2.5 Variabel yang berpengaruh paling dominan terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.....	107

BAB VI KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

6.1 Kesimpulan.....	108
6.2 Implikasi.....	109

6.3 Saran..... 109

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1 Rincian Pengembalian Kuesioner	59
Tabel 5.2 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	60
Tabel 5.3 Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	61
Tabel 5.4 Deskripsi Responden Berdasarkan Masa Kerja	62
Tabel 5.5 Tanggapan responden terhadap sistem akuntansi keuangan daerah	63
Tabel 5.6 Tanggapan responden terhadap transparansi publik	67
Tabel 5.7 Tanggapan responden terhadap aktivitas pengendalian.....	71
Tabel 5.8 Tanggapan responden terhadap akuntabilitas keuangan.....	75
Tabel 5.9 Statistik Deskriptif	79
Tabel 5.10 Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)	81
Tabel 5.11 Hasil Uji Validitas Variabel Transparansi Publik (X2).....	82
Tabel 5.12 Hasil Uji Validitas Variabel Aktivitas Pengendalian (X3)	83
Tabel 5.13 Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas Keuangan (Y).....	84
Tabel 5.14 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian.....	85
Tabel 5.15 Uji Statistik Kolmogorov-Smirnov Test	88
Tabel 5.16 Uji Multikolinearitas	89
Tabel 5.17 Analisis Regresi Linier Berganda	91
Tabel 5.18 Uji Parsial (Uji T)	93
Tabel 5.19 Uji Simultan (Uji F)	96
Tabel 5.20 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual	35
Gambar 5.1 <i>Normal Probability Plot</i>	86
Gambar 5.2 Grafik Histogram.....	87
Gambar 5.3 Uji Heteroskedastisitas	90

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : KUESIONER PENELITIAN

LAMPIRAN 2 : TABULASI DATA

LAMPIRAN 3 : HASIL ANALISIS DATA

1. DESKRIPSI RESPONDEN
2. ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF
3. UJI INSTRUMEN PENELITIAN
 - A. UJI VALIDITAS
 - B. UJI RELIABILITAS
4. UJI ASUMSI KLASIK
 - A. UJI NORMALITAS
 - B. UJI MULTIKOLINIERITAS
 - C. UJI HETEROSKEDASTISITAS
5. ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA
 - A. UJI SIGNIFIKANSI PARSIAL (UJI T)
 - B. UJI SIGNIFIKAN SIMULTAN (UJI F)
 - C. UJI KOEFISIEN DETERMINASI (R^2)

LAMPIRAN 4 : DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perubahan paradigma pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu tuntutan yang perlu direspon oleh pemerintah, karena perubahan tersebut mengakibatkan manajemen keuangan semakin kompleks. Terkait reformasi pengelolaan keuangan daerah adalah adanya penggunaan akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah (Abdul Halim, 2012). Pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar daerah akan memperoleh sumber-sumber penerimaan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana instrumen atau sistem pengelolaan keuangan daerah mampu memberikan nuansa keuangan yang lebih adil, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab.

Di negara maju, akuntansi pemerintahan dianggap sebagai bagian integral dan aspek keberhasilan reformasi sektor publik. Selain menjadi alat untuk modernisasi manajemen keuangan pemerintah, akuntansi dianggap sebagai senjata terhadap penipuan dan limbah di pemerintah (Torres, 2004:32). Dalam konteks sektor publik, akuntansi harus dianggap sebagai informasi manajemen keuangan dan sistem pelaporan untuk penggunaan pemerintah dan manajemen, parlemen dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama (Barton, 2007:50).

Pada otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan manajemen keuangan yang sehat. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang telah ditetapkan, pemerintah daerah berkewajiban untuk membuat laporan pertanggung jawaban keuangan yang terdiri dari laporan perhitungan anggaran, neraca, laporan arus kas beserta amota penghitungan anggaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 menyatakan bahwa “Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk peraturan daerah”. Pembaharuan sistem keuangan daerah tersebut dimaksudkan agar pengelolaan uang rakyat (public money) dilakukan secara transparan dengan mendasarkan konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas publik (public accountability).

Selain dari pada itu, sistem tersebut harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang baik. Chabib Sholeh dan Heru Rochmansjah, (2010) menerangkan prinsip dalam sistem akuntansi keuangan daerah sangat diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah yang meliputi : (1) Akuntabilitas, (2) Value for Money, (3) Kejujuran dalam mengelola keuangan publik dan (4) Transparansi dan (5) Pengendalian.

Membangun sistem akuntansi keuangan daerah di Pemerintahan Daerah merupakan salah satu solusi pemerintah daerah untuk mengelola keuangan, baik transaksi yang berkaitan dengan anggaran, operasi maupun aset, kewajiban dan ekuitas, sehingga pada akhir periode dapat dihasilkan laporan keuangan. Sistem akuntansi keuangan ini juga diperlukan untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat diaudit (auditable) sehingga memudahkan pengawasan terhadap

penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam hal transparansi pengelolaan keuangan.

Tuntutan dilaksanakannya akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah sangat beralasan karena akuntansi dapat menjadi salah satu alat kontrol yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemberdayaan masyarakat. Akuntansi keuangan daerah merupakan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas Pemerintah Daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas Pemerintahan Daerah.

Pihak-pihak eksternal entitas Pemerintah Daerah yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Keuangan (BPK), investor-kreditur-donatur, analisis ekonomi – pemerhati Pemerintah Daerah - rakyat, PEMDA lain, dan Pemerintah Pusat yang seluruhnya berada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah.

Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambilan keputusan berperilaku sesuai dengan mandat atau amanah yang diterimanya. Untuk itu, baik dalam proses perumusan kebijakan, cara-cara untuk mencapai keberhasilan atas kebijakan yang telah dirumuskan berikut hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal kepada masyarakat.

Dalam konteks otonomi daerah, value for money merupakan jembatan untuk menghantarkan pemerintah daerah mencapai good governance. Value for money harus dioperasikan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana publik (public money) yang mendasarkan konsep value for money, maka diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang baik. Hal tersebut dapat dicapai apabila pemerintah daerah memiliki sistem akuntansi keuangan daerah yang baik. Pengelolaan keuangan daerah juga harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk korupsi dapat diminimalkan. Sedangkan transparansi adalah keterbukaan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Selain itu juga diperlukan aktivitas pengendalian, sebagai contoh pengendalian terhadap pendapatan dan belanja daerah. Hal tersebut harus sering dievaluasi, misalnya dengan cara membandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai. Untuk itu perlu dilakukan analisis varians (selisih) terhadap pendapatan dan belanja daerah agar dapat sesegera mungkin dicari penyebab timbulnya varians untuk kemudian dilakukan tindakan antisipasi ke depan.

Prinsip pengendalian internal yang baik sebaiknya jangan ada suatu pekerjaan dari awal sampai akhir dilaksanakan oleh satu orang. Ada tiga fungsi yang harus dipisahkan agar aktivitas pengendalian dapat berfungsi dengan baik : (1) Fungsi Pencatatan, (2) Fungsi Penyimpanan dan (3) Fungsi Operasional.

Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Atas hal tersebut, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi dan sistem pengendalian yang handal. Jika sistem akuntansi dan sistem pengendalian yang dimiliki masih lemah, maka kualitas informasi yang dihasilkan dari sistem tersebut juga kurang handal. Oleh karena itu, dalam rangka memantapkan otonomi daerah dan desentralisasi, pemerintah daerah seharusnya sudah mulai memikirkan investasi untuk pembangunan sistem akuntansi pemerintah daerah dan meningkatkan aktivitas pengendalian yang lebih baik.

Sistem akuntansi keuangan daerah memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah untuk memfasilitasi tercapainya transparansi dan akuntabilitas publik. Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas keuangan mengharuskan pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan.

Pemerintah daerah dituntut untuk tidak sekedar melakukan vertical reporting, yaitu pelaporan kepada pemerintah atasan (termasuk pemerintah pusat), akan tetapi juga melakukan horizontal reporting, yaitu pelaporan kinerja pemerintah daerah kepada DPRD dan Masyarakat luas sebagai bentuk horizontal accountability. Salah satu tujuan reformasi pengelolaan keuangan daerah

mengubah pola pertanggungjawaban vertikal menjadi pola pertanggungjawaban horizontal dalam hal ini pertanggungjawaban kepada para pemilihnya, mengingat kepala daerah dipilih oleh rakyat secara langsung.

Sementara selama ini transparansi atau keterbukaan menjadi sesuatu yang mahal, apalagi yang menyangkut informasi atau data tentang keuangan. Hal ini sangat dirasakan oleh beberapa kalangan yang membutuhkan informasi tersebut diantaranya para mahasiswa yang melakukan penelitian yang memerlukan data-data tentang keuangan. Bagi para birokrat data keuangan dipandang sebagai rahasia negara yang tidak semua orang boleh mengetahuinya, padahal keuangan daerah pada dasarnya adalah dana publik yang setiap anggota masyarakat berhak mengetahuinya, bahkan jika perlu dilaporkan secara berkala kepada pemilik dana tersebut yakni masyarakat. Transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah daerah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya daerah kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk melakukan pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik diperlukan informasi akuntansi yang salahsatunya berupa laporan keuangan.

Beberapa penelitian sebelumnya seperti Nuzli Rahmatia (2016) yang menganalisis pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik dan aktivitas pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintahan Kota Medan, penelitiannya

menghasilkan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik dan aktivitas pengendalian berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintahan Kota Medan.

Sedangkan pada penelitian Azima Medina Amrul (2017) yang menganalisis pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik dan aktivitas pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar, penelitiannya menghasilkan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik dan aktivitas pengendalian tidak berpengaruh secara simultan terhadap Akuntabilitas keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Berdasarkan latar belakang dan masalah diatas maka peneliti berniat untuk meneliti tentang seberapa besar “Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan pernyataan singkat suatu masalah yang akan diteliti. Agar memudahkan peneliti dalam menentukan konsep teoritis yang ditelaah dan memilih metode penguji data yang tepat, masalah penelitian sebaiknya dinyatakan dalam bentuk pertanyaan yang mengekspresikan secara jelas hubungan antara dua variabel atau lebih (Sangadji dan Sopiah, 2010:45).

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian berpengaruh secara simultan terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat?
2. Apakah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian berpengaruh Secara parsial terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat?
3. Variabel manakah yang berpengaruh dominan terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian berpengaruh secara simultan terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian berpengaruh secara parsial terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis Variabel mana yang berpengaruh dominan terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai sumber informasi mengenai faktor sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik dan aktivitas pengendalian yang mempengaruhi akuntabilitas keuangan sehingga dapat dimanfaatkan dalam upaya peningkatan akuntabilitas publik pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
2. Sebagai persyaratan akademik untuk penyelesaian studi program pascasarjana pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Nobel Indonesia Makassar;
3. Sebagai bahan rujukan/referensi untuk pengembangan serta sumber informasi atau masukan pada peneliti selanjutnya dalam bidang yang sama.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya yang ada hubungannya dengan variabel sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik, aktivitas pengendalian dan akuntabilitas keuangan adalah sebagai berikut:

1. Dewi Yuli Angraini (2016), Pengaruh Penerapan Sistem Keuangan Daerah, Transparansi, Aktivitas Pengendalian Dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah; (2) Transparansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah; (3) Aktivitas pengendalian berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah; (4) Penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Nuzli Rahmatia (2016), Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintahan Kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi akuntabilitas keuangan; (2) Transparansi Publik tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan; (3) Aktivitas

pengendalian tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan;
(4) Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik dan aktivitas pengendalian berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas keuangan.

3. Sri Cahyati (2016), Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik, Dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Skpd Di Pemerintahan Kabupaten Asahan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Intervening Dan Pelatihan Kerja Sebagai Variabel Moderating. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik, Aktivitas Pengendalian, dan Pelatihan Kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah, sedangkan Komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah; (2) Secara bersama-sama Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik, Aktivitas Pengendalian, Komitmen organisasi dan Pelatihan Kerja berpengaruh positif dan Signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah sebesar 50,99 %; (3) Komitmen Organisasi memediasi pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah dengan total pengaruh sebesar 42.4%, memiliki pengaruh tidak langsung secara positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah, namun tidak berpengaruh signifikan secara langsung, Artinya tingginya Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dapat meningkatkan Komitmen Organisasi dan komitmen organisasi yang tinggi dapat meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Daerah;

- (4) Pelatihan Kerja tidak memoderasi pengaruh antara Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah pada SKPD Kabupaten Asahan.
4. Azima Medina Amrul (2017), Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah; (2) Transparansi Publik tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas Keuangan; (3) Aktivitas Pengendalian tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan; (4) Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian tidak berpengaruh secara simultan terhadap Akuntabilitas keuangan.
 5. Flora Madaresta Sitorus (2019), Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Skpd Kota Tanjungbalai). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Variabel sistem pengendalian internal secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Tanjungbalai; (2) Variabel kompetensi sumber daya manusia secara parsial berpengaruh signifikan negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Tanjungbalai; (3) Variabel pemanfaatan teknologi informasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Tanjungbalai; (4)

Variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Tanjungbalai; (5) Variabel sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Tanjungbalai.

6. Mukhlisul Muzahid, M. Yazid AR, Rusdy dan Dasmi Husin (2019), Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan pada SKPD Kabupaten Aceh Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Secara simultan sistem akuntansi keuangan daerah dan aktivitas pengendalian berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan pada SKPD pemerintah di Kabupaten Aceh Utara; (2) Secara parsial sistem akuntansi keuangan daerah dan aktivitas pengendalian berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan pada SKPD pemerintah di Kabupaten Aceh Utara. Hal ini dapat diartikan bahwa baik sistem akuntansi keuangan daerah dan aktivitas pengendalian maka akan semakin baik kualitas akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.
7. Sang Ayu Putu Arie Indraswarawati, Cokorda Gede Bayu Putra dan I Putu Teresna Jaya Manggala (2020), Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Gianyar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD

berpengaruh positif dan signifikan terhadap terhadap akuntabilitas keuangan di Pemerintah Kabupaten Gianyar. Faktor aktivitas pengendalian berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan di Pemerintah Kabupaten Gianyar. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan aktivitas pengendalian sebesar 66,2% dapat dijelaskan oleh variabel akuntabilitas keuangan, sedangkan sisanya sebesar 33,8% dijelaskan oleh faktor atau variabel lain.

8. Ria Herlina, Taufeni Taufik dan Azwir Nasir (2021), Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Transparansi, kompetensi, dan sistem akuntansi keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya, sistem pengendalian internal pemerintah dapat memoderasi pengaruh transparansi dan sistem akuntansi keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sistem pengendalian internal pemerintah tidak dapat memoderasi pengaruh kompetensi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

2.2 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Untuk mewujudkan pemerintahan yang amanah dan baik (good governance) sesuai dengan yang diharapkan, maka diperlukan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik. Selain dari sistem akuntansi yang baik dan sumber daya manusia yang baik dalam penggunaan dan pelaporan keuangan sudah seharusnya disertakan dengan transparansi publik dan didukung oleh aktivitas

pengendalian, agar dapat tercipta akuntabilitas keuangan yang baik pula seperti yang diharapkan masyarakat.

Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBD. Akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari akuntansi sektor publik, yang mencatat dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan daerah.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 merupakan suatu sistem yang secara komprehensif mengatur prosedur-prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas, prosedur akuntansi selain kas, dan prosedur akuntansi aset. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam setiap prosedur tersebut adalah fungsi yang terkait, dokumen yang digunakan, laporan yang dihasilkan, dan uraian teknis prosedur. Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 diganti Permendagri No. 59 Tahun 2007 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah: “Serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer”.

Sistem akuntansi keuangan daerah mempunyai peran yang sangat penting terkait penyampaian sebuah informasi, sistem akuntansi ini digunakan sebagai fasilitas untuk menunjang kinerja dari pemerintah daerah. Sistem akuntansi ini diharapkan bisa memperbaiki sistem pencatatan dan sistem pelaporan menuju ke

arah yang semakin baik. Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain yang digunakan untuk mendukung terciptanya fungsi akuntansi dari awal analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di dalam lingkup pemerintah daerah (Permendagri No. 64 Tahun 2013).

Tujuan utama dari sistem akuntansi merupakan pemberian serangkaian informasi yang bersifat keuangan yang akan dipakai oleh pihak pemakai. Abdul Halim (2012) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada sektor publik adalah untuk:

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (management control).
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya; dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (accountability).

Dalam akuntansi pemerintahan, data akuntansi digunakan untuk memberi informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif dan masyarakat. Akuntansi pemerintahan itu sendiri dibedakan atas akuntansi pemerintah pusat dan akuntansi pemerintah daerah yang

sering kita sebut dengan akuntansi keuangan daerah. Akuntansi pemerintah daerah itu sendiri terdiri dari akuntansi keuangan pemerintah provinsi dan akuntansi pemerintah kabupaten/kota.

Akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu bagian akuntansi, maka di dalam akuntansi keuangan daerah juga terdapat proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi keuangan ekonomi yang terjadi di pemerintah daerah. Ada beberapa sistem pencatatan yang dapat digunakan yaitu sistem pencatatan single entry, double entry, dan triple entry. Salah satu yang membedakan antara pembukuan akuntansi adalah dalam menggunakan sistem pencatatan. Pembukuan hanya menggunakan sistem single entry, sedangkan akuntansi dapat menggunakan double entry dan triple entry.

1. Single Entry

Sistem pencatatan single entry sering disebut juga dengan sistem tata buku tunggal atau tata buku saja. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran.

Sistem pencatatan single entry atau tata buku ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu sederhana dan mudah dipahami. Namun sistem ini memiliki kelemahan, antara lain yaitu kurang bagus untuk pelaporan (kurang memudahkan penyusunan laporan), sulit untuk menemukan kesalahan pembukuan yang terjadi, dan sulit dikontrol. Oleh karena itu, dalam akuntansi terdapat sistem pencatatan yang lebih baik dan dapat mengatasi kelemahan di

atas. Sistem ini disebut dengan sistem pencatatan double entry. Sistem pencatatan double entry inilah yang sering disebut dengan akuntansi.

2. Double entry

Sistem pencatatan double entry sering disebut juga dengan sistem tata buku berpasangan. Menurut sistem ini, pada dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat dua kali. Pencatatan dengan sistem ini dikenal dengan istilah menjurnal. Dalam pencatatan tersebut ada diisi debit dan kredit. Sisi debit ada disebelah kiri sedangkan sisi kredit ada disebelah kanan. Dalam melakukan pencatatan, setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi merupakan alat bantu untuk memahami pencatatan sistem ini. Persamaan dasar akuntansi tersebut berbentuk sebagai berikut :

$$\text{Aktiva} + \text{Belanja} = \text{Utang} + \text{Ekuitas Dana} + \text{Pendapatan}$$

Suatu transaksi yang berakibat bertambahnya aktiva akan dicatat pada sisi debit, sedangkan yang berakibat berkurangnya aktiva akan dicatat pada sisi kredit. Hal yang sama dilakukan untuk belanja. Hal sebaliknya dilakukan untuk utang, ekuitas dana dan pendapatan. Apabila suatu transaksi mengakibatkan bertambahnya utang, maka pencatatan akan dilakukan pada sisi kredit. Sedangkan jika mengakibatkan berkurangnya uang, maka pencatatan dilakukan disisi kredit. Jika mengakibatkan berkurangnya utang, maka pencatatan dilakukan pada sisi debit. Hal serupa dilakukan untuk ekuitas dana dan pendapatan. Cara melakukan pencatatan sistem double

entry atau menjurnal ini adalah dengan mencatat sisi debet tepat disisi kiri dan mencatat sisi kredit agak menjorok ke kanan kira kira 1 – 2 cm.

Pada era reformasi, sistem pencatatan yang digunakan pada akuntansi keuangan daerah adalah sistem tata buku tunggal (single entry). Berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, sistem pencatatan yang digunakan adalah sistem pencatatan double entry. Sistem ini akan terus dipertahankan di masa-masa mendatang walaupun peraturan perundangannya berubah.

3. Triple Entry

Sistem pencatatan triple entry adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan doubly entry, ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Jadi, sementara sistem pencatatan doubly entry dijalankan, satuan pemegang kas pada satuan kerja maupun pada bagian keuangan atau badan dan biro pengelola kekayaan daerah juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran, sehingga pencatatan tersebut akan berefek pada sisa anggaran.

Definisi Sistem Akuntansi Pemerintahan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.

Sementara itu, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 pasal 232 juncto, sistem akuntansi keuangan daerah didefinisikan sebagai: “Serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data,

pencatatan, pengihktisan, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.” Sementara menurut Erlina dan Rasdianto, (2013:6) Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Sedangkan Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintahan daerah diatur dengan peraturan gubernur / bupati / walikota yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan diatur dengan Peraturan Menteri Akuntansi Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri. Sistem akuntansi Pemerintahan daerah disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian internal sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengendalian internal dan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, setiap SKPD menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tersebut secara periodik yang meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran SKPD
- b. Neraca SKPD
- c. Catatan atas Laporan keuangan SKPD

Sistem akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Sedangkan sistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) dilakukan oleh PPK-SKPD. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah sekurang-kurangnya meliputi sebagai berikut:

- a. Produser Akuntansi Penerimaan Kas

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 241 mengatakan bahwa prosedur akuntansi penerimaan kas adalah : “serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban APBD yang dapat dilakukan secara manual menggunakan aplikasi komputer”. Prosedur akuntansi penerimaan kas dilaksanakan oleh pejabat pengelolaan keuangan (PPK-SKPD) berdasarkan buku transaksi penerimaan kas melainkan pencatatan dalam jurnal penerimaan kas dengan mencantumkan uraian rekening lawan asal penerimaan kas berkenaan, secara periodik jurnal tersebut diposting ke buku besar.

Buku transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas yaitu :

- 1) Surat Tanda Bukti Pembayaran;
- 2) Bukti Transfer;
- 3) Nota Kredit Bank.

b. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas

Peraturan Menteri Dalam negeri No. 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelola keuangan daerah pasal 247 mengatakan bahwa prosedur akuntansi kas adalah : “serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.” Prosedur akuntansi penerimaan kas dilaksanakan oleh pejabat pengelolaan keuangan (PPK-SKPD) berdasarkan bukti transaksi pengeluaran kas melakukan pencatatan dalam jurnal pengeluaran kas dengan mencantumkan uraian rekening lawan asal penerimaan kas berkenaan, secara periodik jurnal tersebut diposting ke buku besar.

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas mencakup :

- 1) SP2D;
- 2) Nota Debet Bank;
- 3) Bukti Pengeluaran Kas Lainnya.

c. Prosedur Akuntansi Aset Tetap / Barang Milik Daerah

Peraturan Menteri Dalam negeri No. 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelola keuangan daerah pasal 253 mengatakan bahwa

prosedur akuntansi aset adalah : “serangkaian pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, relibitas, perubahan klasifikasi dan penyusutan terhadap aset yang dikuasai atau digunakan SKPD”.

Prosedur akuntansi aset dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan (PPK-SKPD) serta pejabat pengurus dan penyimpanan barang SKPD. PPK – SKPD berdasarkan bukti memorial melakukan pencatatan ke dalam jurnal umum, dan secara periodic jurnal tersebut diposting ke dalam buku besar. Setiap aset kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan dilakukan penyusutan sistematis sesuai dengan masa manfaatnya. Metode penyusutan yang dapat dilakukan adalah garis lurus, saldo menurun ganda dan unit produksi. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi aset berupa memorial yang memuat informasi jenis/nama aset tetap, kode rekening, klasifikasi aset tetap, nilai aset tetap dan tanggal transaksi dan/atau kejadian.

d. **Prosedur Akuntansi Selain Kas.**

Peraturan Menteri Dalam negeri No. 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelola keuangan daerah pasal 259 mengatakan bahwa prosedur akuntansi selain kas adalah : “serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.”

Prosedur akuntansi selain kas dilaksanakan oleh pejabat pengelolaan keuangan (PPK-SKPD) berdasarkan bukti memorial melakukan

pencatatan ke dalam jurnal umum, dan secara periodik jurnal tersebut diposting ke buku besar. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi selain kas berupa bukti memorial yang memuat informasi berita acara penerimaan barang, surat keputusan penghapusan barang, surat keputusan mutasi barang, berita acara pemusnahan barang, berita acara serah terima barang, berita acara penilaian dan berita acara penyelesaian pekerjaan. Pembuatan laporan keuangan dilakukan oleh masing-masing SKPD. Laporan keuangan tersebut akan dikonsolidasikan oleh entitas pelaporan dalam hal ini disebut Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) menjadi laporan keuangan pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten.

Akuntansi keuangan daerah memegang peranan penting dalam perbaikan manajemen keuangan daerah, sebagaimana kita ketahui akuntansi keuangan daerah berfungsi menghasilkan output berupa laporan keuangan yang akan menjadi dasar bagi penilaian kinerja pemerintah daerah (stakeholders pemerintah daerah) mempunyai informasi keuangan akurat dan berkualitas. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas memenuhi karakteristik ; Relevan, Andal, dapat di bandingkan, dan dapat dipahami (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa pemerintah menyusun sistem akuntansi pemerintah yang mengacu pada Standar

Akuntansi Pemerintah, Sistem akuntansi pemerintah pada tingkat pemerintah pusat diatur dengan peraturan Menteri Keuangan yakni peraturan Menteri keuangan No.59/PMK.06/2005 mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat, sedangkan sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat daerah diatur dengan peraturan Gubernur/Bupati/Walikota, mengacu pada peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah, maka sistem akuntansi pemerintahan pada pemerintah daerah diatur oleh peraturan pemerintah No.58 tahun 2005 mengenai pengelolaan keuangan daerah dan juga didukung oleh peraturan menteri dalam negeri No.59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yaitu pasal 232 yang mengatur tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

2.3 Transparansi Publik

Menurut Erlina, Sirojuzilam, Rasdianto (2012:66), transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip-prinsip good governance yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan dilakukannya transparansi tersebut, publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual. Sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk

membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan direncanakan, menilai ada tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban anggaran, menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait, mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait (Mahmudi, 2010). Transparansi adalah keterbukaan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsive terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. (Chabib Sholeh dan Heru Rochmansjah, 2010:87).

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan (Mardiasmo, 2004:45). Transparansi mengisyaratkan bahwa laporan tahunan tidak hanya dibuat tetapi juga terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, karena aktivitas pemerintah adalah dalam rangka menjalankan amanat rakyat. Sekarang ini, banyak negara mengklasifikasikan catatan atau laporan sebagai Top Secret, Secret, Confidential dan Restricted, dan Official Secrets Acts membuat unauthorized disclosure terhadap suatu criminal offence.

Kultur secara umum dibanyak negara, baik negara maju maupun negara berkembang, adalah kerahasiaan (Shende dan Bennet, 2004:64).

2.4 Aktivitas Pengendalian

Istilah pengendalian berasal dari bahasa Inggris yaitu “control” adalah merupakan salah satu fungsi terpenting dari manajemen. Pengendalian secara umum bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan dapat berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya atau seperti apa yang telah direncanakan (Mardiasmo, 2009:76). Pengendalian merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Manajemen adalah mengenai motivasi, organisasi dan memimpin suatu tim yang terdiri dari orang-orang dengan aktivitas untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan.

Aktivitas Pengendalian merupakan suatu kebijakan dan prosedur untuk melakukan kegiatan, mengidentifikasi risiko dan pengambilan keputusan. Sedangkan menurut Arens, Alvin A. (2015) adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa tindakan yang perlu telah diambil untuk mengatasi risiko dalam pencapaian sasaran. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur untuk membantu memastikan perintah manajemen telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan, serta memastikan tindakan-tindakan yang perlu telah dilakukan untuk mengatasi risiko dalam pencapaian tujuan entitas. Permasalahan lemahnya pengendalian akan membawa dampak kepadakerugian yang besar dan bahkan kemungkinan terjadinya

kegagalan organisasi. Mengingat arti pentingnya, pengendalian hampir selalu disebutkan dalam setiap literature manajemen. Mardiasmo (2009:98) menjelaskan, aktivitas pengendalian merupakan kebijakan, prosedur, teknik, dan mekanisme yang digunakan untuk menjamin arahan manajemen telah dilaksanakan.

Aktivitas pengendalian seharusnya efisien dan efektif, menyajikan kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, ketaatan/kepatuhan terhadap undang-undang, kebijakan dan peraturan lain untuk mencapai tujuan pengendalian itu sendiri. Aktivitas pengendalian meliputi :

1. Pemisahan fungsi/tugas/ wewenang yang cukup
2. Otorisasi transaksi dan aktivitas lainnya yang sesuai
3. Pengendalian secara fisik terhadap aset dan catatan
4. Evaluasi secara independen atas kinerja
5. Pengendalian terhadap pemrosesan informasi, hal ini berkaitan dengan proses otorisasi, kelengkapan dan keakuratan data keuangan. Pengendalian pemrosesan informasi digolongkan menjadi dua, yaitu :
 - a. Pengendalian umum
 - b. Pengendalian aplikasi
6. Pembatasan akses terhadap sumber daya dan catatan

Di dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah dituntut untuk lebih akuntabel. Untuk mewujudkan hal tersebut maka pelaksana roda pemerintahan diharapkan lebih terbuka dan berhati-hati dalam menggunakan anggaran atau kekayaan daerah untuk kepentingan masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari aktivitas pengendalian yang nantinya dibuat menjadi laporan hasil evaluasi

dari aktivitas pengendalian dan seterusnya mengkomunikasikan kejadian yang relevan, handal, dan tepat waktu.

Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commissions, 2013 mendefinisikan Pengendalian Internal sebagai proses yang dirancang dan dipengaruhi oleh dewan entitas direktur, manajemen, dan personel lainnya. Di dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah dituntut untuk lebih akuntabel. Untuk mewujudkan hal tersebut maka pelaksana roda pemerintahan diharapkan lebih terbuka dan berhati-hati dalam menggunakan anggaran atau kekayaan daerah untuk kepentingan masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari aktivitas pengendalian yang nantinya dibuat menjadi laporan hasil evaluasi dari aktivitas pengendalian dan seterusnya mengkomunikasikan kejadian yang relevan, handal, dan tepat waktu (Anggraini, Anggi, 2016).

2.5 Akuntabilitas Keuangan

Menurut Abdul Halim (2019), Akuntabilitas merupakan kewajiban-kewajiban dari individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik yang bersangkutan untuk dipertanggung jawabkan. Rakyat sebagai pemberi amanah pada wakilnya di DPRD memberikan tugas dan tanggung jawab agar DPRD Bersama Lembaga eksekutif untuk mengelola keuangan pemerintah daerah. Tujuan dari pelaksanaan akuntabilitas adalah untuk mencari jawaban atas perihal yang dipertanggung jawabkan, berdasarkan hal yang telah terjadi serta membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi. Apabila terjadi suatu penyimpangan atau hambatan, maka penyimpangan dan

hambatan tersebut harus segera dikoreksi. Maka pelaksanaan suatu kegiatan diharapkan masih bisa mencapai tujuan yang diharapkan (Renyowijoyo, 2013).

Akuntabilitas keuangan menurut Abdul Halim (2012) merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Akuntabilitas keuangan menekankan pada pelaporan yang akurat dan tepat waktu tentang penggunaan dana publik, biasanya dilakukan melalui laporan yang telah diaudit secara profesional. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa dana publik telah digunakan dan dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang telah ditetapkan secara efektif, efisien dan transparan.

Dalam mencapai tujuan tersebut terdapat empat tahapan yang dapat dilakukan (Abdul Halim, 2019), yaitu:

1. Pelaporan merupakan kewajiban yang dilaksanakan oleh steward atau pemerintah untuk mempertanggung jawabkan atau melaporkan hasil kinerjanya dalam mengelola sumber daya atau dana publik;
2. Pencarian informasi atau investigasi merupakan kewenangan dari pemilik sumber dana atau masyarakat untuk mengetahui bagaimana kinerja pemerintah dalam mengelola sumber dana;
3. Penilaian atau verifikasi merupakan kewenangan dari pemilik sumber dana atau masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah dalam mengelola sumber dana; dan

4. Pengawasan merupakan tindak pengendalian yang dilakukan oleh pemilik sumber dana untuk mengawasi agar tujuan tercapai.

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada unit organisasi pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan keuangan pemerintah secara periodik. Secara umum Akuntabilitas dipahami sebagai :

1. Kewajiban seseorang/lembaga untuk memberikan laporan yang memuaskan atas tindakan sebagai akibat wewenang yang dimiliki/diterima (satisfactory report);
2. Pengukuran tanggungjawab yang diekspresikan dalam nilai uang, unit kekayaan atau dasar lain yang ditentukan sebelumnya (responsibility);
3. Kewajiban membuktikan kinerja yang baik, sesuai dengan ketentuan (hukum, persetujuan atau kebiasaan).

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam permendagri No. 13 tahun 2006 dijelaskan bahwa azas umum pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

2. Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
4. Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
5. Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
6. Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
7. Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
8. Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

9. Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
10. Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
11. Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Gejala yang terjadi dalam perkembangan keuangan daerah di Indonesia dewasa ini adalah semakin menguatnya tuntutan akuntabilitas pemerintah daerah. Pada dasarnya, akuntabilitas pemerintah daerah terhadap masyarakat (publik) adalah pemberian informasi dan pengungkapan (disclosure) atas aktiva dan kinerja financial pemerintah daerah kepada para pemangku keputusan. Pemerintah daerah harus bisa menjadi subjek pemberian informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak daerah, yaitu hak untuk tahu (right to know), hak untuk diberi informasi (right to be informed), hak untuk didengar aspirasinya (right to be heard and to be listened too).

BAB III

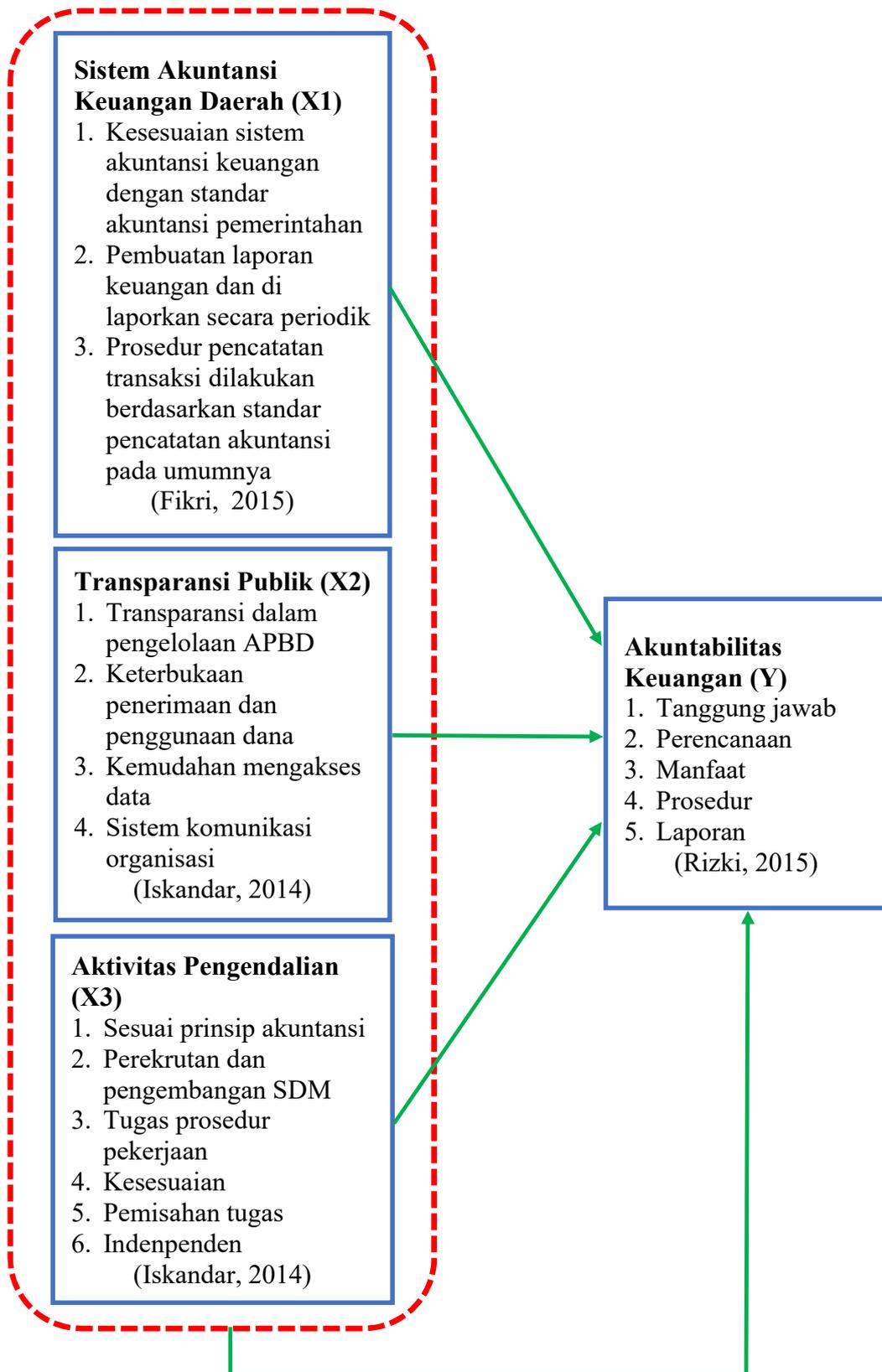
KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN

3.1 Kerangka Konseptual

Kuncoro, (2011:44) Kerangka konseptual adalah pondasi utama dimana sepenuhnya proyek penelitian ditujukan, dimana hal ini merupakan jaringan hubungan antar variabel yang secara logis diterangkan, dikembangkan dan elaborasi dari perumusan masalah yang telah diidentifikasi melalui proses wawancara, observasi dan survei literatur.

Kerangka konseptual dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan mengungkapkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti berdasarkan latar belakang dari kajian-kajian teori yang telah dikemukakan di atas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak adanya pengaruh hubungan antara variabel bebas yaitu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik, dan Aktivitas Pengendalian terhadap variabel terikat yaitu Akuntabilitas Keuangan baik secara parsial maupun secara simultan

Berdasarkan dari uraian latar belakang, tinjauan pustaka dengan teori yang dijelaskan di bab terdahulu terhadap penelitian ini, maka sebagai kerangka pikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 3.1 Kerangka Konseptual

3.2 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono, (2017:95), hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan hanya didasarkan pada teori relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Diduga Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian berpengaruh positif dan signifikan secara bersamaan (Simultan) terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Diduga Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Variabel yang berpengaruh paling dominan terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

3.3 Definisi Operasional Variabel

Dalam rangka menguji hipotesis yang telah dijelaskan dalam landasan teori sebelumnya maka variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi 2 yaitu: Variabel dependen dan variabel independen.

1. Akuntabilitas Keuangan (Y) adalah keadaan seseorang/instansi yang berkewajiban memberikan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut Rizki (2015) Indikator untuk variabel Akuntabilitas Keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. Tanggung jawab;
 - b. Perencanaan;
 - c. Manfaat;
 - d. Prosedur;
 - e. Laporan.
2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1) adalah merupakan suatu serangkaian prosedur yang dimulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, hingga laporan keuangan dalam hal pertanggungjawaban pelaksana APBD yang bisa dilakukan secara manual atau memanfaatkan aplikasi komputer. Menurut Fikri (2015) Indikator untuk variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. Kesesuaian sistem akuntansi keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan;
 - b. Pembuatan laporan keuangan dan di laporkan secara periodik;
 - c. Prosedur pencatatan transaksi dilakukan berdasarkan standar pencatatan akuntansi pada umumnya.
3. Transparansi Publik (X2) adalah prinsip menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan

menjamin kemudahan didalam memperoleh Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya publik. Menurut Iskandar (2014) Indikatornya untuk variabel Transparansi Publik adalah sebagai berikut:

- a. Transparansi dalam Pengelolaan APBD;
 - b. Keterbukaan dalam penerimaan dan penggunaan dana di SKPD;
 - c. Kemudahan mengakses data;
 - d. Sistem komunikasi organisasi.
4. Aktivitas pengendalian (X3) adalah tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan, prosedur, teknik, dan mekanisme yang digunakan untuk menjamin arahan manajemen untuk mengidentifikasi resiko terhadap pencapaian tujuan yang akan dilakukan. Menurut Iskandar (2014) Indikatornya untuk variabel Aktivitas Pengendalian adalah sebagai berikut:
- a. Harus sesuai Prinsip Akuntansi;
 - b. Perekrutan dan Pengembangan SDM;
 - c. Tugas Prosedur dalam Pekerjaan;
 - d. Kesesuaian;
 - e. Pemisahan Tugas;
 - f. Independen.

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian survey yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok (Singarimbun, 2011). Survey merupakan studi yang bersifat kuantitatif yang digunakan untuk meneliti gejala suatu kelompok atau perilaku individu. Penelitian survey dapat digunakan untuk maksud penjajakan (*eksploratif*), menguraikan (*deskriptif*), dan penjelasan (*explanatory*) yaitu untuk menjelaskan hubungan kausal dan pengujian hipotesa, evaluasi, prediksi atau meramalkan kejadian tertentu di masa yang akan datang, penelitian operasional dan pengembangan indikator-indikator sosial.

Survey dalam penelitian ini adalah suatu desain yang digunakan untuk menyelidiki mengenai pengaruh variabel sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik dan aktivitas pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Sehingga dengan penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala.

4.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian dilakukan pada Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Waktu penelitian dilakukan mulai Mei 2021 sampai dengan Juni 2021.

4.3 Populasi dan Sampel

Penentuan populasi dan sampel sangatlah penting bagi suatu penelitian. Populasi dan sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

4.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2017:80) memberi pengertian bahwa: Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Subjek penelitian yang akan dijadikan populasi adalah seluruh pegawai di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat dengan jumlah populasi penelitian sebanyak 215 orang, yang akan memberikan data dan keterangan tentang Sistem Keuangan Daerah, Transparansi Publik, Aktivitas Pengendalian dan Akuntabilitas Keuangan.

4.3.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2017:81) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. dalam penelitian dilakukan terhadap sampel yang mewakili populasinya. Untuk mendapatkan sampel yang dapat mewakili populasi, maka dalam penentuan sampel penelitian ini digunakan rumus Slovin (dalam Umar, 2013) sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

Dimana :

n = ukuran sampel

N = persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir.

dari jumlah populasi tersebut dengan tingkat kelonggaran ketidak telitian ditetapkan sebesar 10% maka dengan menggunakan rumus diatas diperoleh sampel sebesar:

$$n = \frac{215}{1 + 215 (0.10)^2} = 68,25 \text{ dibulatkan menjadi } 68$$

Atas dasar perhitungan diatas, maka sampel yang harus diambil dalam penelitian ini adalah berjumlah 68 responden.

4.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan suatu informasi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data tentang pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik dan aktivitas pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan. pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Observasi adalah kegiatan penelitian dengan terjun langsung melakukan pengamatan di lapangan sesuai dengan objek yang diamati. Observasi juga adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati langsung, melihat dan mengambil suatu data yang dibutuhkan di tempat

penelitian itu dilakukan. Pengumpulan data dengan observasi dilakukan di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

2. Wawancara adalah merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka langsung dengan narasumber dengan cara tanya jawab langsung data yang diperoleh langsung dengan pegawai sebagai responden dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sistematis.
3. Kuesioner adalah suatu daftar pertanyaan, metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner secara personal (*personally administered questionnaires*). Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner (angket) tertutup, yaitu angket yang digunakan untuk mendapatkan data tentang sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik dan aktivitas pengendalian dalam usahanya untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan. Dalam pengukuran variabel tersebut digunakan skala likert yaitu membagi 5 jawaban responden yang mulai berturut-turut:
 - a. Sangat Setuju (SS) dengan skor 5
 - b. Setuju (S) dengan skor 4
 - c. Netral/ragu-ragu (N) dengan skor 3
 - d. Tidak setuju (TS) dengan skor 2
 - e. Sangat tidak setuju (STS) dengan skor 1
4. Dokumentasi adalah suatu pengumpulan data dengan cara melihat langsung sumber-sumber dokumen yang terkait. Dengan arti lain bahwa dokumentasi

sebagai pengambilan data melalui dokumen tertulis maupun elektronik. Digunakan sebagai mendukung kelengkapan data yang lain. Dokumentasi yang dilakukan melalui penelusuran terhadap dokumen yang telah tersedia pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan dijadikan arsip untuk memperkuat hasil pengamatan.

4.5 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

4.6 Metode Analisis Data

Agar suatu data yang telah terkumpul dapat bermanfaat, maka perlu dilakukan analisis data. Analisis data merupakan proses pengolahan data yang telah terkumpul dan penginterpretasian hasil pengolahan data yang terkumpul tersebut berikut kesimpulannya (Priyatno, 2008). Kemudian Mas'ud (2011), menerangkan bahwa analisis data dilakukan setelah data dari lapangan terkumpul. Dengan demikian disimpulkan bahwa analisis data perlu dilakukan sebagai

langkah selanjutnya setelah data dari lapangan terkumpul, serta bertujuan mengolah dan menginterpretasikan hasil pengolahan data berikut kesimpulannya.

1. Metode Analisis Deskriptif

Menurut Sugiyono (2014:21) metode analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menjelaskan karakteristik responden meliputi umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan masa kerja. Selain itu analisis statistik deskriptif juga digunakan untuk menjelaskan tanggapan responden terhadap variabel penelitian.

2. Metode Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Sugiyono (2017:275) analisis regresi linier berganda digunakan oleh peneliti, apabila peneliti meramalkan bagaimana naik turunnya keadaan variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor predictor dinaik turunkan nilainya (dimanipulasi). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan program SPSS. Beberapa teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

4.6.1 Uji Instrumen Penelitian

Uji instrumen penelitian dimaksudkan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas instrumen sehingga dapat diketahui layak tidaknya digunakan untuk pengumpulan data pada pegawai di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Uji instrumen penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Uji validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika Pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2011). Untuk mengukur validitas dapat dilakukan dengan melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. Sedangkan untuk mengambil skor masing-masing item pertanyaan valid atau tidak maka ditetapkan kriteria statistik sebagai berikut:

1. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ dan bernilai positif, maka variabel tersebut valid.
2. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka variabel tersebut tidak valid.
3. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ tetapi bertanda negatif, maka H_0 akan tetap ditolak dan H_1 diterima.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah untuk mengukur suatu kuesioner yang mempunyai indikator dari variabel atau konstruk. suatu kuesioner dinyatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2011). Uji reliabilitas dapat dilakukan

dengan menggunakan bantuan program SPSS, yang akan memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha $> 0,60$ (Ghozali, 2011).

4.6.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik untuk menguji suatu model yang termasuk layak atau tidak layak digunakan dalam penelitian. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinieritas.

a. Uji Normalitas

Ghozali (2011) menyatakan bahwa uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas residual dilakukan dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov test dengan taraf signifikan 5%. Dasar pengambilan keputusan nilai Sig $\geq 0,05$ maka dikatakan berdistribusi normal. Jika nilai Sig $< 0,05$ maka dikatakan berdistribusi tidak normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau indepenen. Pengujian dilakukan untuk melihat ada tidaknya hubungan linear antara variabel bebas (indeks), dilakukan dengan menggunakan Variance Inflation Factor (VIF) dan tolerance value (Ghozali, 2011). Batas dari tolerance value adalah $> 0,10$ atau nilai VIF < 10 .

c. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2011), uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (nilai errornya). Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas, penelitian ini menggunakan uji Glejser. Pengujian ini membandingkan signifikansi dari uji tersebut terhadap α sebesar 5%.

4.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Data yang telah dihimpun kemudian dianalisis dengan menggunakan regresi berganda untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas, yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian, Variabel terikat yaitu Akuntabilitas Keuangan. analisa regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah (X_1), transparansi public (X_2) dan aktivitas pengendalian (X_3) terhadap akuntabilitas keuangan (Y). Adapun model persamaan yang digunakan adalah menurut Sugiyono (2014:224) sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Akuntabilitas Keuangan

X_1 = Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

X_2 = Transparansi Publik

X_3 = Aktivitas Pengendalian

β = Koefisien Regresi

α = Konstanta

e = Error Term

4.6.4 Uji Hipotesis

Uji hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Uji signifikansi parsial (Uji T)

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi hubungan antara variabel X dan Y apakah variabel X benar-benar berpengaruh terhadap variabel secara individual atau parsial terhadap variabel Y (Ghozali, 2011). Dalam penelitian ini digunakan Uji t, untuk menguji variabel independen secara satu persatu ada atau tidaknya pengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011).

Langkah-langkah pengujiannya sebagai berikut:

1. Menentukan formasi Hipotesis Nihil (H_0) Hipotesis Alternatif (H_1)

$H_0 : \beta_1 = 0$, berarti variabel independen bukan merupakan variabel penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

$H_1 : \beta_1 > 0$, berarti variabel independen tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

2. *Level of significant* ($\alpha = 0.05$)

Sampel n = jumlah sampel

3. Menentukan kriteria pengujian

H_1 ditolak apabila $t_{hitung} < t_{table}$

H_0 ditolak apabila $t_{hitung} > t_{table}$

4. Mencari t hitung

Pengujian lanjutan yaitu uji signifikansi parsial yang berfungsi apabila peneliti Mencari makna pengaruh parsial variabel X terhadap variabel Y maka hasil korelasi tersebut diuji dengan uji signifikansi parsial dengan rumus berikut (Ridwan, 2009).

$$t \text{ hitung} = \frac{r \sqrt{n-2}}{\sqrt{n-r^2}}$$

Keterangan

t hitung = nilai t

r = nilai koefisien korelasi

n = jumlah sampel

5. Kesimpulan

Apabila t hitung > t tabel maka H₀ ditolak, artinya ada pengaruh positif.

Apabila t hitung < t tabel maka H₀ diterima, artinya tidak ada pengaruh.

b. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji statistik F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas (independen) yang di masukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat (dependent) (Koncoro, 2009). Dalam penelitian ini juga menggunakan uji F, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh positif yang signifikan antara variabel bebas (independen) yaitu sistem akuntansi keuangan daerah (X₁), transparansi publik (X₂) dan aktivitas pengendalian (X₃) terhadap variabel bebas (devenden) yaitu akuntabilitas keuangan (Y) (Ghozali, 2011). Langkah-langkah pengujiannya:

1. Menentukan taraf nyata (level of significant) 0,05 atau (5%).
2. Menentukan derajat kebebasan (df) F tabel = 2 : n-k-1.
3. Menentukan formulasi Ho dan Ha.

H0 : $\beta = 0$, artinya tidak ada pengaruh positif yang signifikan antara sistem akuntansi keuangan daerah (X₁), transparansi publik (X₂) dan aktivitas pengendalian (X₃) terhadap akuntabilitas keuangan (Y).

Ha : $\beta > 0$, artinya ada pengaruh positif yang signifikan antara sistem akuntansi keuangan daerah (X₁), transparansi publik (X₂) dan aktivitas pengendalian (X₃) terhadap akuntabilitas keuangan (Y).

4. Mencari F hitung

Selanjutnya untuk mengetahui signifikansi simultan dicari dahulu f hitung kemudian dibandingkan dengan f tabel. dengan rumus f hitung sebagai berikut (Ridwan, 2009).

$$f \text{ hitung} = \frac{\frac{r^2}{k}}{\frac{(1 - R^2)}{n - k - 1}}$$

Keterangan:

f hitung = nilai f yang dihitung

R = nilai koefisien regresi berganda

k = jumlah variabel bebas

n = jumlah sampel

5. Keputusan / Kesimpulan

jika $f_{hitung} > f_{tabel}$, maka hipotesa yang menyatakan ada pengaruh positif yang signifikan antara sistem akuntansi keuangan daerah (X_1), transparansi publik (X_2) dan aktivitas pengendalian (X_3) terhadap akuntabilitas keuangan (Y) adalah diterima.

jika $f_{hitung} < f_{tabel}$, maka hipotesa yang menyatakan ada pengaruh positif yang signifikan antara sistem akuntansi keuangan daerah (X_1), transparansi publik (X_2) dan aktivitas pengendalian (X_3) terhadap akuntabilitas keuangan (Y) adalah ditolak.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji R^2 dimaksudkan untuk mengukur kemampuan seberapa besar persentase variasi variabel bebas (independen) pada model regresi linear berganda dalam menjelaskan variasi variabel terikat (dependent) (Priyatno, 2008). Dengan kata lain pengujian model menggunakan R^2 , dapat menunjukkan bahwa variabel-variabel independen yang digunakan dalam model regresi linear berganda adalah variabel-variabel independen yang mampu mewakili keseluruhan dari variabel-variabel independen lainnya dalam mempengaruhi variabel dependen, kemudian Besarnya pengaruh ditunjukkan dalam bentuk persentase. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai R^2 yang kecil 0 (nol) berarti kemampuan variabel-variabel bebas (independen) yaitu sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik dan aktivitas pengendalian amat terbatas. begitu pula sebaliknya, nilai R^2 yang mendekati 1 (satu) berarti variabel-variabel bebas (independen) memberikan

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi Variabel terikat (dependen) (Ghozali, 2011). Koefisien determinasi dilakukan untuk mendeteksi ketepatan yang paling baik dalam analisis regresi ini, yaitu dengan membandingkan besarnya nilai koefisien determinan, jika R^2 semakin besar mendekati 1 (satu) maka model semakin tepat.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian

5.1.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

a. Gambaran Singkat BPKPD Prov. Sulbar

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Badan ini didirikan pada tahun 2016. Jumlah pegawai pada badan ini ialah berjumlah 215 yang terdiri dari 168 ASN dan 47 Pegawai Honorer. Jumlah unit kerja yang di bawah oleh badan ini berjumlah 12 yang terdiri dari sekretariat, bidang pajak, bidang non pajak, bidang penyusunan anggaran dan bina kab/kota, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi, bidang pengelolaan barang milik daerah, UPTBD samsat Mamuju, UPTBD samsat Mamuju Utara, UPTBD samsat Majene, UPTBD samsat Polewali Mandar, dan UPTBD samsat Mamasa.

Adapun visi badan ini ialah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan di BPKPD Provinsi Sulawesi Barat. Misinya ialah menjadi institusi yang responsif dalam mewujudkan optimalisasi pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah secara efektif, transparan dan akuntabel.

b. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi BPKPD Prov. Sulbar

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disingkat BPKPD, merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan dibidang Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Barang Milik Daerah. Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Gubernur

menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Keuangan, Pendapatan dan Barang Milik Daerah yang dibentuk Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79) dan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 46).

Maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Provinsi Sulawesi Barat merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di Bidang Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Barang Milik Daerah. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Provinsi Sulawesi Barat dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui sekretaris Daerah Provinsi.

2. Tugas Pokok

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut BPKPD Provinsi, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Gubernur menyelenggarakan urusan

pemerintahan dibidang Keuangan, Pendapatan, dan Barang Milik Daerah.

3. Fungsi

Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat adalah :

- 1) Perumusan kebijakan dibidang Anggaran, Pendapatan, Perbendaharaan, Akuntansi, Barang Milik Daerah dan Bina Kabupaten/Kota;
- 2) Pelaksanaan kebijakan dibidang Anggaran, Pendapatan, Perbendaharaan, Akuntansi, Barang Milik Daerah dan Bina Kabupaten/Kota;
- 3) Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan dibidang Anggaran, Pendapatan, Perbendaharaan, Akuntansi, Barang Milik Daerah dan Bina Kabupaten/Kota;
- 4) Pengoordinasian dan fasilitasi dibidang Anggaran, Pendapatan, Perbendaharaan, Akuntansi, Barang Milik Daerah dan Bina Kabupaten/Kota;
- 5) Pengendalian dibidang Anggaran, Pendapatan, Perbendaharaan, Akuntansi, Barang Milik Daerah dan Bina Kabupaten/Kota.

c. Struktur Organisasi BPKPD Prov. Sulbar

Badan termasuk dalam suatu organisasi, maka dari hal tersebut sebagai organisasi yang baik semestinya memiliki pembagian tugas masing-masing yang dimiliki oleh setiap orang-orang di dalamnya. Guna menjadi organisasi yang

berkualitas maka setiap organisasi membagikan tugas kepada setiap orang-orang di dalamnya sesuai dengan kemampuan dan keahlian mereka. Jika berbicara mengenai Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat maka struktur organisasinya sebagai berikut:

Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pendapatan Pajak Daerah, terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Administrasi;
 - b. Sub Bidang Pendataan dan Penagihan;
 - c. Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian.
4. Bidang Pendapatan Non Pajak Daerah, terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Pendapatan Retribusi;
 - b. Sub Bidang Pendapatan Dana Perimbangan dan Dana Transfer;
 - c. Sub Bidang Pendapatan Lain-lain.
5. Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten/Kota, terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tidak Langsung;
 - b. Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung dan Pembiayaan;
 - c. Sub Bidang Bina Kabupaten/Kota.

6. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Belanja Langsung;
 - b. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
 - c. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah.
7. Bidang Akuntansi, terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Akuntansi Keuangan;
 - b. Sub Bidang Akuntansi Barang Milik Daerah;
 - c. Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban.
8. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan;
 - b. Sub Bidang Penggunaan, Pemanfaatan dan Pengamanan;
 - c. Sub Bidang Penatausahaan dan Pengendalian.
9. Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah (UPTBD)
 - a. Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah (UPTBD) Samsat Kabupaten Polewali Mandar
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2) Seksi Penetapan dan Pendataan;
 - 3) Seksi Pembayaran dan Penagihan.
 - b. Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah (UPTBD) Samsat Kabupaten Majene
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2) Seksi Penetapan dan Pendataan;
 - 3) Seksi Pembayaran dan Penagihan.

- c. Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah (UPTBD) Samsat Kabupaten Mamuju
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2) Seksi Penetapan dan Pendataan;
 - 3) Seksi Pembayaran dan Penagihan.
- d. Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah (UPTBD) Samsat Kabupaten Mamasa
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2) Seksi Penetapan dan Pendataan;
 - 3) Seksi Pembayaran dan Penagihan.
- e. Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah (UPTBD) Samsat Kabupaten Mamuju Utara
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2) Seksi Penetapan dan Pendataan;
 - 3) Seksi Pembayaran dan Penagihan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

5.1.2 Deskripsi Data

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara mengantarkan langsung kuesioner kepada responden yang bekerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang terpilih menjadi sampel melalui proses sampel yang telah dijelaskan pada bab metode penelitian.

Pendistribusian kuesioner dilakukan dengan cara mengantarkan langsung kuesioner kepada para pegawai yang menjadi sampel penelitian. Responden menetapkan janji untuk pengambilan kuesioner selama 1 minggu terhitung sejak kuesioner diantarkan kepada responden atau sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan antara responden dan peneliti. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 68 responden. Dari pengembalian kuesioner yang disebar, 68 (100%) kuesioner yang diterima kembali oleh peneliti.

Tabel 5.1 Rincian Pengembalian Kuesioner

NO	Bidang BPKPD	Jumlah Kuesioner yang dibagikan	Jumlah Kuesioner yang dikembalikan
1	Sekretariat BPKPD	10	10
2	Bidang Pendapatan Non Pajak Daerah	10	10
3	Bidang Pendapatan Pajak Daerah	8	8
4	Bidang Anggaran dan Bina Kab/Kota	10	10
5	Bidang Perbendaharaan	10	10
6	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	10	10
7	Bidang Akuntansi	10	10
Total		68	68

Sumber: Data primer diolah 2021

5.1.3 Deskripsi Responden

Kuesioner yang disebar 68 eksemplar, semua kuesioner memenuhi kriteria. Karakteristik responden yang menjadi subjek dalam penelitian ini terdiri dari jenis kelamin tingkat pendidikan dan masa kerja. Dalam kuesioner responden boleh tidak mencantumkan identitas pribadi atau nama untuk kerahasiaan informasi yang diberikan responden.

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Data jenis kelamin responden pada Tabel 5.2 berikut:

Tabel 5.2 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

		Jenis Kelamin			Cumulative
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	Laki-Laki	37	54,4	54,4	54,4
	Perempuan	31	45,6	45,6	100,0
	Total	68	100,0	100,0	

Sumber: Data primer diolah 2021

Berdasarkan dari jenis kelamin, responden dibagi menjadi dua yaitu laki-laki dan perempuan. Dari hasil kuesioner yang disebarkan ditemukan bahwa responden laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan responden perempuan. Dari hasil pengolahan data dapat dilihat bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 37 orang dengan tingkat persentase 54,4% dan responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 31 orang dengan tingkat persentase 45,6%.

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Terdapat empat klasifikasi yang digunakan untuk mengelompokkan tingkat pendidikan responden, hasil perhitungan persentase mendapatkan mayoritas dari mereka berlatar belakang berpendidikan Sarjana (S1) dengan jumlah 41 orang dengan tingkat persentase mencapai 60,3%. Kelompok lain yang memiliki jumlah banyak adalah responden berlatar belakang pendidikan Magister (S2) dengan jumlah 15 orang dengan tingkat persentase mencapai 22,1%, kemudian berpendidikan SMA/SMK dengan jumlah 7 orang dengan tingkat persentase mencapai sebanyak 10,3%, dan yang berpendidikan diploma dengan jumlah 5

orang dengan tingkat persentase mencapai sebanyak 7,4% Perincian sebaran tingkat pendidikan diperlihatkan pada Tabel 5.3 berikut.

Tabel 5.3 Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

		Tingkat Pendidikan			Cumulative
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	Magister (Strata2)	15	22,1	22,1	22,1
	Sarjana (Strata1)	41	60,3	60,3	82,4
	Diploma (D3)	5	7,4	7,4	89,7
	SMA/SMK	7	10,3	10,3	100,0
	Total	68	100,0	100,0	

Sumber: Data primer diolah 2021

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

Pengelompokan responden berdasarkan masa kerja memberikan hasil sebagai berikut: responden yang paling banyak adalah mereka yang masa kerja 11-15 tahun yaitu sebanyak 28 orang dengan tingkat persentase 41,2%, diikuti yang masa kerja 5-10 tahun yaitu sebanyak 25 orang dengan tingkat persentase 36,8%, kemudian yang masa kerja 16-20 tahun sebanyak 7 orang dengan tingkat persentase 10,3% dan responden yang paling sedikit adalah yang masa kerja kurang dari 5 tahun dan lebih dari 20 tahun masing-masing sebanyak 4 orang dengan tingkat persentase 5,9%. Adapun data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.4 berikut:

Tabel 5.4 Deskripsi Responden Berdasarkan Masa Kerja

		Masa Kerja			Cumulative
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	< 5 Tahun	4	5,9	5,9	5,9
	5 – 10 Tahun	25	36,8	36,8	42,6
	11 – 15 Tahun	28	41,2	41,2	83,8
	16 – 20 Tahun	7	10,3	10,3	94,1
	> 20 Tahun	4	5,9	5,9	100,0
	Total	68	100,0	100,0	

Sumber: Data primer diolah 2021

5.1.4 Deskripsi Variabel Penelitian

Deskripsi variabel penelitian untuk menunjukkan tanggapan responden mengenai pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik dan aktivitas pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Berikut dijelaskan tanggapan responden dari variabel dependen dan independen.

1. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem akuntansi keuangan daerah adalah merupakan suatu serangkaian prosedur yang dimulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, hingga laporan keuangan dalam hal pertanggungjawaban pelaksana APBD yang bisa dilakukan secara manual atau memanfaatkan aplikasi komputer. Indikator sistem akuntansi keuangan daerah adalah kesesuaian sistem akuntansi keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, pembuatan laporan keuangan dan di laporkan secara periodik dan prosedur pencatatan transaksi dilakukan berdasarkan standar pencatatan akuntansi pada umumnya.

Tabel 5.5 Tanggapan responden terhadap sistem akuntansi keuangan daerah

Item		Sangat Setuju	Setuju	Netral	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Total
		5	4	3	2	1	
X1.1	F	32	35	1			68
	%	47,1	51,5	1,5			100
X1.2	F	16	45	7			68
	%	23,5	66,2	10,3			100
X1.3	F	21	42	5			68
	%	30,9	61,8	7,4			100
X1.4	F	38	28	2			68
	%	55,9	41,2	2,9			100
X1.5	F	23	40	5			68
	%	33,8	58,8	7,4			100
X1.6	F	23	41	4			68
	%	33,8	60,3	5,9			100
X1.7	F	24	32	12			68
	%	35,3	47,1	17,6			100
X1.8	F	20	42	2	4		68
	%	29,4	61,8	2,9	5,9		100
X1.9	F	25	42	1			68
	%	36,8	61,8	1,5			100
X1.10	F	26	39	3			68
	%	38,2	57,4	4,4			100

Sumber: Data primer diolah 2021

Tabel 5.5 menunjukkan bahwa dari 68 responden yang diteliti memberikan jawaban yang bervariasi dan jika dicermati maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pertanyaan pertama “Sistem Akuntansi Keuangan pada Instansi ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan”. Ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak pada kategori setuju sebanyak 35 orang atau

51,5% dari total responden dan penilaian paling sedikit dengan kategori netral sebanyak 1 orang atau 1,5% dari total responden.

- b. Pertanyaan kedua “Setiap transaksi keuangan pada Instansi ini dilakukan dengan analisis transaksi / identifikasi transaksi”. Ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak pada kategori setuju sebanyak 45 orang atau 66,2% dari total responden dan penilaian paling sedikit dengan kategori netral sebanyak 7 orang atau 10,3% dari total responden.
- c. Pertanyaan ketiga “Pada Instansi ini dilaksanakan pengidentifikasian terhadap pencatatan”. Ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak pada kategori setuju sebanyak 42 orang atau 61,8% dari total responden dan penilaian paling sedikit dengan kategori netral sebanyak 5 orang atau 7,4% dari total responden.
- d. Pertanyaan keempat “Setiap transaksi keuangan pada Instansi ini didukung oleh bukti transaksi”. Ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak pada kategori sangat setuju sebanyak 38 orang atau 55,9% dari total responden dan penilaian paling sedikit dengan kategori netral sebanyak 2 orang atau 2,9% dari total responden.
- e. Pertanyaan kelima “Pada Instansi ini semua transaksi keuangan dilakukan pencatatan secara kronologis”. Ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak pada kategori setuju sebanyak 40 orang atau 58,8% dari total responden dan penilaian paling sedikit dengan kategori netral sebanyak 5 orang atau 7,4% dari total responden.

- f. Pertanyaan keenam “Pada Instansi ini dilakukan Pengklasifikasian terhadap transaksi yang terjadi”. Ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak pada kategori setuju sebanyak 41 orang atau 60,3% dari total responden dan penilaian paling sedikit dengan kategori netral sebanyak 4 orang atau 5,9% dari total responden.
- g. Pertanyaan ketujuh “Pada Instansi ini dilakukan klasifikasi atau transaksi sesuai dengan pos-pos semestinya”. Ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak pada kategori setuju sebanyak 32 orang atau 47,1% dari total responden dan penilaian paling sedikit dengan kategori netral sebanyak 12 orang atau 17,6% dari total responden.
- h. Pertanyaan kedelapan “Sistem pengendalian dilakukan dalam mengukur dan melaporkan pencatatan”. Ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak pada kategori setuju sebanyak 42 orang atau 61,8% dari total responden dan penilaian paling sedikit dengan kategori netral sebanyak 2 orang atau 2,9% dari total responden.
- i. Pertanyaan kesembilan “Pembuatan laporan keuangan dilakukan setiap periode akuntansi”. Ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak pada kategori setuju sebanyak 42 orang atau 61,8% dari total responden dan penilaian paling sedikit dengan kategori netral sebanyak 1 orang atau 1,5% dari total responden.
- j. Pertanyaan kesepuluh “Pelaporan laporan keuangan dilakukan secara konsisten dan periodik”. Ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak pada kategori setuju sebanyak 39 orang atau 57,4% dari total

responden dan penilaian paling sedikit dengan kategori netral sebanyak 3 orang atau 4,4% dari total responden.

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa sesuai indikator yang digunakan ternyata paling banyak responden memberikan penilaian kategori setuju dan paling sedikit responden memberikan penilaian netral, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada umumnya responden memberikan pernyataan setuju apabila sistem akuntansi keuangan daerah diukur dengan indikator: kesesuaian sistem akuntansi keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, pembuatan laporan keuangan dan di laporkan secara periodik dan prosedur pencatatan transaksi dilakukan berdasarkan standar pencatatan akuntansi pada umumnya.

2. Transparansi Publik

Transparansi publik adalah prinsip menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya publik. Indikator transparansi publik adalah transparansi dalam pengelolaan APBD, keterbukaan dalam penerimaan dan penggunaan dana di SKPD, kemudahan mengakses data dan sistem komunikasi organisasi.

Tabel 5.6 Tanggapan responden terhadap transparansi publik

Item		Sangat Setuju	Setuju	Netral	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Total
		5	4	3	2	1	
X2.1	F	22	24	14	7	1	68
	%	32,4	35,3	20,6	10,3	1,5	100
X2.2	F	12	16	13	22	5	68
	%	17,6	23,5	19,1	32,4	7,4	100
X2.3	F	21	39	4	3	1	68
	%	30,9	57,4	5,9	4,4	1,5	100
X2.4	F	13	39	12	4		68
	%	19,1	57,4	17,6	5,9		100
X2.5	F	10	16	24	17	1	68
	%	14,7	23,5	35,3	25	1,5	100
X2.6	F	11	18	15	24		68
	%	16,2	26,5	22,1	35,3		100
X2.7	F	5	26	11	22	4	68
	%	7,4	38,2	16,2	32,4	5,9	100
X2.8	F	13	19	8	21	7	68
	%	19,1	27,9	11,8	30,9	10,3	100
X2.9	F	12	20	14	15	7	68
	%	17,6	29,4	20,6	22,1	10,3	100
X2.10	F	18	46	1	3		68
	%	26,5	67,6	1,5	4,4		100

Sumber: Data primer diolah 2021

Tabel 5.6 menunjukkan bahwa dari 68 responden yang diteliti memberikan jawaban yang bervariasi dan jika dicermati maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pertanyaan pertama “Menurut saya, pengumuman pengelolaan APBD kepada masyarakat dapat meningkatkan transparansi”. Ditanggapi

responden dengan penilaian paling banyak pada kategori setuju sebanyak 24 orang atau 35,3% dari total responden dan penilaian paling sedikit dengan kategori sangat tidak setuju sebanyak 1 orang atau 1,5% dari total responden.

- b. Pertanyaan kedua “Meskipun suara rakyat atau usulan rakyat diakomodasi melalui musrembang, transparansi publik tentang APBD tetap di manipulasi”. Ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak pada kategori tidak setuju sebanyak 22 orang atau 32,4% dari total responden dan penilaian paling sedikit dengan kategori sangat tidak setuju sebanyak 5 orang atau 7,4% dari total responden.
- c. Pertanyaan ketiga “Musrembang dapat meningkatkan kebijakan transparansi APBD”. Ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak pada kategori setuju sebanyak 39 orang atau 57,4% dari total responden dan penilaian paling sedikit dengan kategori sangat tidak setuju sebanyak 1 orang atau 1,5% dari total responden.
- d. Pertanyaan keempat “Transparansi APBD dapat mengakomodasi dan meningkatkan usulan atau suara rakyat”. Ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak pada kategori setuju sebanyak 39 orang atau 57,4% dari total responden dan penilaian paling sedikit dengan kategori tidak setuju sebanyak 4 orang atau 5,9% dari total responden.
- e. Pertanyaan kelima “Pengumuman tentang APBD bisa didapat setiap waktu”. Ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak pada kategori netral sebanyak 24 orang atau 35,3% dari total responden dan

penilaian paling sedikit dengan kategori sangat tidak setuju sebanyak 1 orang atau 1,5% dari total responden.

- f. Pertanyaan keenam “Pengumuman kebijakan APBD mudah didapatkan oleh publik”. Ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak pada kategori tidak setuju sebanyak 24 orang atau 35,3% dari total responden dan penilaian paling sedikit dengan kategori sangat setuju sebanyak 11 orang atau 16,2% dari total responden.
- g. Pertanyaan ketujuh “Informasi yang diberikan kepada publik selama ini menurut saya tidak dapat meningkatkan pengelolaan transparansi anggaran”. Ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak pada kategori setuju sebanyak 26 orang atau 38,2% dari total responden dan penilaian paling sedikit dengan kategori sangat tidak setuju sebanyak 4 orang atau 5,9% dari total responden.
- h. Pertanyaan kedelapan “Aliran penggunaan dana dari kas setiap SKPD harus disampaikan kepada masyarakat secara terbuka”. Ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak pada kategori tidak setuju sebanyak 21 orang atau 30,9% dari total responden dan penilaian paling sedikit dengan kategori sangat tidak setuju sebanyak 7 orang atau 10,3% dari total responden.
- i. Pertanyaan kesembilan “Akses untuk memperoleh dokumen publik tentang APBD sulit diperoleh karena birokratis”. Ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak pada kategori setuju sebanyak 20 orang atau 29,4% dari total responden dan penilaian paling sedikit dengan

kategori sangat tidak setuju sebanyak 7 orang atau 10,3% dari total responden.

- j. Pertanyaan kesepuluh “Sistem komunikasi organisasi pada pemerintahan harus melakukan sosialisasi program kebijakan kepada masyarakat secara terbuka”. Ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak pada kategori setuju sebanyak 46 orang atau 67,6% dari total responden dan penilaian paling sedikit dengan kategori netral sebanyak 1 orang atau 1,5% dari total responden.

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa sesuai indikator yang digunakan ternyata paling banyak responden memberikan penilaian kategori setuju dan paling sedikit responden memberikan penilaian sangat tidak setuju, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada umumnya responden memberikan pernyataan setuju apabila transparansi publik diukur dengan indikator: transparansi dalam pengelolaan APBD, keterbukaan dalam penerimaan dan penggunaan dana di SKPD, kemudahan mengakses data dan sistem komunikasi organisasi.

3. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan, prosedur, teknik, dan mekanisme yang digunakan untuk menjamin arahan manajemen untuk mengidentifikasi resiko terhadap pencapaian tujuan yang akan dilakukan. Indikator aktivitas pengendalian adalah harus sesuai prinsip akuntansi, perekrutan dan pengembangan SDM, tugas prosedur dalam pekerjaan, kesesuaian, pemisahan tugas dan independen.

Tabel 5.7 Tanggapan responden terhadap aktivitas pengendalian

Item		Sangat Setuju	Setuju	Netral	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Total
		5	4	3	2	1	
X3.1	F	18	41	7	2		68
	%	26,5	60,3	10,3	2,9		100
X3.2	F	19	46	2	1		68
	%	27,9	67,6	2,9	1,5		100
X3.3	F	32	35	1			68
	%	47,1	51,5	1,5			100
X3.4	F	29	37	1	1		68
	%	42,6	54,4	1,5	1,5		100
X3.5	F	24	35	3	2		68
	%	41,2	51,5	4,4	2,9		100
X3.6	F	29	34	3	2		68
	%	42,6	50	4,4	2,9		100
X3.7	F	17	48	2	1		68
	%	25	70,6	2,9	1,5		100
X3.8	F	18	40	7	3		68
	%	26,5	58,8	10,3	4,4		100

Sumber: Data primer diolah 2021

Tabel 5.7 menunjukkan bahwa dari 68 responden yang diteliti memberikan jawaban yang bervariasi dan jika dicermati maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pertanyaan pertama “Pemilihan prinsip akuntansi dan pengembangan estimasi akuntansi konsisten dengan tujuan dan pelaporan yang wajar”. Ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak pada kategori setuju sebanyak 41 orang atau 60,3% dari total responden dan penilaian

paling sedikit dengan kategori tidak setuju sebanyak 2 orang atau 2,9% dari total responden.

- b. Pertanyaan kedua “Kebijakan dan prosedur personel yang ada menghasilkan perekrutan atau pengembangan orang yang berkompeten dan dapat dipercaya yang diperlukan untuk mendukung struktur pengendalian intern yang efektif”. Ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak pada kategori setuju sebanyak 46 orang atau 67,6% dari total responden dan penilaian paling sedikit dengan kategori tidak setuju sebanyak 1 orang atau 1,5% dari total responden.
- c. Pertanyaan ketiga “Personel harus memahami tugas prosedur dalam pekerjaan mereka masing-masing”. Ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak pada kategori setuju sebanyak 35 orang atau 51,5% dari total responden dan penilaian paling sedikit dengan kategori netral sebanyak 1 orang atau 1,5% dari total responden.
- d. Pertanyaan keempat “Setiap transaksi pembelanjaan terdapat nota pembayaran yang disetujui dengan dokumen pendukung untuk setiap cek yang disiapkan”. Ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak pada kategori setuju sebanyak 37 orang atau 54,4% dari total responden dan penilaian paling sedikit dengan kategori tidak setuju sebanyak 1 orang atau 1,5% dari total responden.
- e. Pertanyaan kelima “Hanya personel yang mempunyai orientasi yang diizinkan untuk menandatangani cek”. Ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak pada kategori setuju sebanyak 35 orang atau

51,5% dari total responden dan penilaian paling sedikit dengan kategori tidak setuju sebanyak 2 orang atau 2,9% dari total responden.

- f. Pertanyaan keenam “Penandatanganan cek dengan memeriksa kesesuaian dari detil cek nota pembayaran sebelum menandatangani”. Ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak pada kategori setuju sebanyak 34 orang atau 50% dari total responden dan penilaian paling sedikit dengan kategori tidak setuju sebanyak 2 orang atau 2,9% dari total responden.
- g. Pertanyaan ketujuh “Terdapat pemisahan tugas antara Personel yang memberi persetujuan nota pembayaran dan personel yang menandatangani cek, antara personel yang menandatangani cek dan personel yang mencatat cek”. Ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak pada kategori setuju sebanyak 48 orang atau 70,6% dari total responden dan penilaian paling sedikit dengan kategori tidak setuju sebanyak 1 orang atau 1,5% dari total responden.
- h. Pertanyaan kedelapan “Pengecekan independen atas kesesuaian iktisar cek harian yang diterbitkan dengan jurnal untuk pengeluaran kas”. Ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak pada kategori setuju sebanyak 40 orang atau 58,8% dari total responden dan penilaian paling sedikit dengan kategori tidak setuju sebanyak 3 orang atau 4,4% dari total responden.

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa sesuai indikator yang digunakan ternyata paling banyak responden memberikan penilaian kategori setuju dan paling sedikit responden memberikan penilaian tidak setuju, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada umumnya responden memberikan pernyataan setuju apabila aktivitas pengendalian diukur dengan indikator: harus sesuai prinsip akuntansi, perekrutan dan pengembangan SDM, tugas prosedur dalam pekerjaan, kesesuaian, pemisahan tugas dan independen.

4. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan adalah keadaan seseorang/instansi yang berkewajiban memberikan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Indikator akuntabilitas keuangan adalah tanggung jawab, perencanaan, manfaat, prosedur, laporan dan pelatihan.

Tabel 5.8 Tanggapan responden terhadap akuntabilitas keuangan

Item		Sangat Setuju	Setuju	Netral	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Total
		5	4	3	2	1	
Y.1	F	25	42		1		68
	%	36,8	61,8		1,5		100
Y.2	F	19	46		3		68
	%	27,9	67,6		4,4		100
Y.3	F	32	34		2		68
	%	47,1	50,0		2,9		100
Y.4	F	28	36		4		68
	%	41,2	52,9		5,9		100
Y.5	F	21	43		4		68
	%	30,9	63,2		5,9		100
Y.6	F	30	37		1		68
	%	44,1	54,4		1,5		100
Y.7	F	22	43		3		68
	%	32,4	63,2		4,4		100
Y.8	F	24	40		4		68
	%	35,3	58,8		5,9		100

Sumber: Data primer diolah 2021

Tabel 5.8 menunjukkan bahwa dari 68 responden yang diteliti memberikan jawaban yang bervariasi dan jika dicermati maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pertanyaan pertama “Pemerintah Daerah telah melaksanakan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan) yang merupakan bagian dari tahapan pengelolaan keuangan daerah yang melibatkan semua unsur-unsur masyarakat”. Ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak pada kategori setuju sebanyak 42 orang

atau 61,8% dari total responden dan penilaian paling sedikit dengan kategori tidak setuju sebanyak 1 orang atau 1,5% dari total responden.

- b. Pertanyaan kedua “Kepentingan publik dan golongan menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam Pengelolaan Keuangan Daerah”. Ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak pada kategori setuju sebanyak 46 orang atau 67,6% dari total responden dan penilaian paling sedikit dengan kategori tidak setuju sebanyak 3 orang atau 4,4% dari total responden.
- c. Pertanyaan ketiga “Pemerintah Daerah telah mampu menjelaskan, menjawab dan mempertanggung jawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional kepada publik melalui Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah yang telah diperiksa oleh BPK dan disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhir tahun anggaran”. Ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak pada kategori setuju sebanyak 34 orang atau 50% dari total responden dan penilaian paling sedikit dengan kategori tidak setuju sebanyak 2 orang atau 2,9% dari total responden.
- d. Pertanyaan keempat “Pemerintah Daerah telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menilai Kinerja Pemerintah Daerah dan menerima saran masyarakat untuk kinerja pemerintah selanjutnya”. Ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak pada kategori setuju sebanyak 36 orang atau 52,9% dari total responden dan

penilaian paling sedikit dengan kategori tidak setuju sebanyak 4 orang atau 5,9% dari total responden.

- e. Pertanyaan kelima “Indikator hasil kinerja yang akan dicapai di tetapkan dan telah digunakan untuk mengevaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah”. Ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak pada kategori setuju sebanyak 43 orang atau 63,2% dari total responden dan penilaian paling sedikit dengan kategori tidak setuju sebanyak 4 orang atau 5,9% dari total responden.
- f. Pertanyaan keenam “Proses dan pertanggung jawaban Pengelolaan Keuangan Daerah diawasi secara terus menerus oleh pengawas intern maupun ekstern”. Ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak pada kategori setuju sebanyak 37 orang atau 54,4% dari total responden dan penilaian paling sedikit dengan kategori tidak setuju sebanyak 1 orang atau 1,5% dari total responden.
- g. Pertanyaan ketujuh “Dalam Hal Perencanaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah telah memperhitungkan Cost and Benefit Analysis yang tidak terbatas dari segi ekonomi tetapi juga sosial dan sebagainya”. Ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak pada kategori setuju sebanyak 43 orang atau 63,2% dari total responden dan penilaian paling sedikit dengan kategori tidak setuju sebanyak 3 orang atau 4,4% dari total responden.
- h. Pertanyaan kedelapan “Pemerintah Daerah telah memiliki prosedur hukum dan pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai landasan

dalam Pembuatan keputusan administrasi publik yang harus dihormati oleh para pegawai sipil dan otoritas publik”. Ditanggapi responden dengan penilaian paling banyak pada kategori setuju sebanyak 40 orang atau 58,8% dari total responden dan penilaian paling sedikit dengan kategori tidak setuju sebanyak 4 orang atau 5,9% dari total responden.

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa sesuai indikator yang digunakan ternyata paling banyak responden memberikan penilaian kategori setuju dan paling sedikit responden memberikan penilaian tidak setuju, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada umumnya responden memberikan pernyataan setuju apabila akuntabilitas keuangan diukur dengan indikator: tanggung jawab, perencanaan, manfaat, prosedur, laporan dan pelatihan.

5.1.5 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai suatu data agar data yang tersaji menjadi mudah dipahami dan informatif bagi yang membacanya. Pengukuran analisis deskriptif variabel dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai kisaran teoritis, kisaran aktual, rata-rata (mean), dan standar deviasi dari masing-masing variabel.

Tabel 5.9 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	68	35	50	42,91	4,206
Transparansi Publik	68	20	50	35,10	6,861
Aktivitas Pengendalian	68	24	40	34,06	3,438
Akuntabilitas Keuangan	68	22	40	34,31	3,963
Valid N (listwise)	68				

Sumber: Data primer diolah 2021

- a. Variabel sistem akuntansi keuangan daerah (X1) memiliki jumlah sample sebanyak 68 dengan nilai terendah (minimum) sebesar 35, dengan nilai tertinggi (maksimum) sebesar 50, nilai rata-rata (mean) sebesar 42,91 dan standar deviasi sebesar 4,206.
- b. Variabel transparansi publik (X2) memiliki jumlah sample sebanyak 68 dengan nilai terendah (minimum) sebesar 20, dengan nilai tertinggi (maksimum) sebesar 50, nilai rata-rata (mean) sebesar 35,10 dan standar deviasi sebesar 6,861.
- c. Variabel aktivitas pengendalian (X3) memiliki jumlah sample sebanyak 68 dengan nilai terendah (minimum) sebesar 24, dengan nilai tertinggi (maksimum) sebesar 40, nilai rata-rata (mean) sebesar 34,06 dan standar deviasi sebesar 3,438.
- d. Variabel akuntabilitas keuangan (Y) memiliki jumlah sample sebanyak 68 dengan nilai terendah (minimum) sebesar 22, dengan nilai tertinggi

(maksimum) sebesar 40, nilai rata-rata (mean) sebesar 34,31 dan standar deviasi sebesar 3,963.

5.1.6 Uji Instrumen Penelitian

Pengujian instrumen dalam penelitian yang menggunakan kuesioner diperlukan untuk menentukan apakah alat pengukuran dapat digunakan atau tidak dalam proses pengumpulan data. Dalam pengujian ini dilakukan proses validitas dan reliabilitas jawaban kuesioner. Dengan dilakukan proses pengujian ini diharapkan hasil hipotesis dengan yang diharapkan.

a. Uji validitas

Pengujian validitas instrumen yaitu menghitung koefisien korelasi antara skor item dan skor totalnya dalam taraf signifikansi 95% atau $\alpha = 0.05$ (Santoso, 2015). Uji validitas dengan metode ini dilakukan mengkorelasikan skor jawaban yang diperoleh masing-masing item dengan skor total dari keseluruhan item. Hasil korelasi harus signifikan berdasarkan ukuran statistik. Koefisien korelasi yang tinggi menunjukkan kesesuaian antara fungsi item dengan fungsi ukur secara keseluruhan atau dengan kata lain instrumen tersebut valid. Validitas dilakukan dengan menggunakan koefisien korelasi *product moment* kriteria pengujian yang digunakan pada instrumen tersebut valid jika nilai $r \geq 0,2387$ (R Tabel). Adapun hasil uji validitas dari setiap item penelitian variabel dalam penelitian ini masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)

Untuk mengetahui pengujian validitas pada variabel sistem akuntansi keuangan daerah, disajikan dalam Tabel 5.10 berikut:

Tabel 5.10 Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)

Item (Indikator)	r Hitung	r Tabel	Status
X1.1	0,760	0,2387	Valid
X1.2	0,776	0,2387	Valid
X1.3	0,754	0,2387	Valid
X1.4	0,661	0,2387	Valid
X1.5	0,540	0,2387	Valid
X1.6	0,771	0,2387	Valid
X1.7	0,714	0,2387	Valid
X1.8	0,706	0,2387	Valid
X1.9	0,681	0,2387	Valid
X1.10	0,750	0,2387	Valid

Sumber: Data primer diolah 2021

Berdasarkan hasil uji validitas yang terlihat pada Tabel 5.10 maka diperoleh angka korelasi (r_{hitung}) yang ternyata hasilnya lebih besar apabila dibandingkan dengan r tabel yang disyaratkan yaitu sebesar 0,2387. Nilai *Correction Item Total Correlation* (r_{hitung}) variabel sistem akuntansi keuangan daerah (X_1) berada diantara 0,540 – 0,776. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai r hitung $>$ 0,2387 (r tabel), sehingga menunjukkan bahwa semua butir pernyataan pada kuesioner sistem akuntansi keuangan daerah (X_1) adalah valid atau mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut, sehingga dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

2. Variabel Transparansi Publik (X_2)

Untuk mengetahui pengujian validitas pada variabel transparansi publik, disajikan dalam Tabel 5.11 berikut:

Tabel 5.11 Hasil Uji Validitas Variabel Transparansi Publik (X₂)

Item (Indikator)	r Hitung	r Tabel	Status
X2.1	0,523	0,2387	Valid
X2.2	0,636	0,2387	Valid
X2.3	0,697	0,2387	Valid
X2.4	0,715	0,2387	Valid
X2.5	0,728	0,2387	Valid
X2.6	0,592	0,2387	Valid
X2.7	0,632	0,2387	Valid
X2.8	0,552	0,2387	Valid
X2.9	0,704	0,2387	Valid
X2.10	0,723	0,2387	Valid

Sumber: Data primer diolah 2021

Berdasarkan hasil uji validitas yang terlihat pada Tabel 5.11 maka diperoleh angka korelasi (r_{hitung}) yang ternyata hasilnya lebih besar apabila dibandingkan dengan r tabel yang disyaratkan yaitu sebesar 0,2387. Nilai *Correction Item Total Correlation* (r_{hitung}) variabel transparansi publik (X₂) berada diantara 0,523 – 0,728. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai r hitung > 0,2387 (r tabel), sehingga menunjukkan bahwa semua butir pernyataan pada kuesioner transparansi publik (X₂) adalah valid atau mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut, sehingga dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

3. Variabel Aktivitas Pengendalian (X₃)

Untuk mengetahui pengujian validitas pada variabel aktivitas pengendalian, disajikan dalam Tabel 5.12 berikut:

Tabel 5.12 Hasil Uji Validitas Variabel Aktivitas Pengendalian (X3)

Item (Indikator)	r Hitung	r Tabel	Status
X3.1	0,579	0,2387	Valid
X3.2	0,558	0,2387	Valid
X3.3	0,599	0,2387	Valid
X3.4	0,619	0,2387	Valid
X3.5	0,653	0,2387	Valid
X3.6	0,816	0,2387	Valid
X3.7	0,739	0,2387	Valid
X3.8	0,803	0,2387	Valid

Sumber: Data primer diolah 2021

Berdasarkan hasil uji validitas yang terlihat pada Tabel 5.12 maka diperoleh angka korelasi (r_{hitung}) yang ternyata hasilnya lebih besar apabila dibandingkan dengan r tabel yang disyaratkan yaitu sebesar 0,2387. Nilai *Correction Item Total Correlation* (r_{hitung}) variabel aktivitas pengendalian (X_3) berada diantara 0,558 – 0,816. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai r hitung > 0,2387 (r tabel), sehingga menunjukkan bahwa semua butir pernyataan pada kuesioner aktivitas pengendalian (X_3) adalah valid atau mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut, sehingga dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

4. Variabel Akuntabilitas Keuangan (Y)

Untuk mengetahui pengujian validitas pada variabel akuntabilitas keuangan, disajikan dalam Tabel 5.13 berikut:

Tabel 5.13 Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas Keuangan (Y)

Item (Indikator)	r Hitung	r Tabel	Status
Y.1	0,682	0,2387	Valid
Y.2	0,675	0,2387	Valid
Y.3	0,736	0,2387	Valid
Y.4	0,803	0,2387	Valid
Y.5	0,782	0,2387	Valid
Y.6	0,711	0,2387	Valid
Y.7	0,746	0,2387	Valid
Y.8	0,789	0,2387	Valid

Sumber: Data primer diolah 2021

Berdasarkan hasil uji validitas yang terlihat pada Tabel 5.13 maka diperoleh angka korelasi (r_{hitung}) yang ternyata hasilnya lebih besar apabila dibandingkan dengan r tabel yang disyaratkan yaitu sebesar 0,2387. Nilai *Correction Item Total Correlation* (r_{hitung}) variabel akuntabilitas keuangan (Y) berada diantara 0,675 – 0,803. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai r hitung > 0,2387 (r tabel), sehingga menunjukkan bahwa semua butir pernyataan pada kuesioner akuntabilitas keuangan (Y) adalah valid atau mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut, sehingga dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas atau kehandalan instrumen merupakan pengujian tingkat konsistensi instrumen itu sendiri. Instrumen yang baik harus konsisten dengan butir yang diukur. Kehandalan instrumen dalam penelitian akan dianalisis dengan teknik *alpha cronbach* dengan menggunakan bantuan sarana komputer program

SPSS. Nilai batas (*cut of point*) yang diterima untuk tingkat *alpha cronbach* adalah ≥ 0.60 , walaupun ini bukan merupakan standar absolut (Sekaran, 2011). Instrumen dianggap telah memiliki tingkat keandalan yang dapat diterima jika nilai koefisien reliabilitas yang terukur adalah ≥ 0.60 . Adapun hasil uji reliabilitas dari setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.14 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Cut of Point</i>	Status
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X ₁)	0,888	0,60	Reliabel
Transparansi Publik (X ₂)	0,845	0,60	Reliabel
Aktivitas Pengendalian (X ₃)	0,826	0,60	Reliabel
Akuntabilitas Keuangan (Y)	0,882	0,60	Reliabel

Sumber: Data primer diolah 2021

Dari Tabel 5.14 pengujian reliabilitas dengan metode *Cronbach's Alpha* dapat diketahui bahwa nilai koefisien reliabilitas yang diukur adalah $\geq 0,60$. Berdasarkan hasil pengolahan data pada uji reliabilitas ini diperoleh nilai koefisien reliabilitas (*Cronbach's Alpha*) untuk variabel sistem akuntansi keuangan daerah (X₁) sebesar 0,888; variabel transparansi publik (X₂) sebesar 0,845; variabel aktivitas pengendalian (X₃) sebesar 0,826 dan variabel akuntabilitas keuangan (Y) sebesar 0,882. Karena seluruh nilai *Cronbach's Alpha* masing-masing variabel berada diatas ambang batas (*cut of point*) 0,60, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel memiliki tingkat keandalan yang dapat diterima.

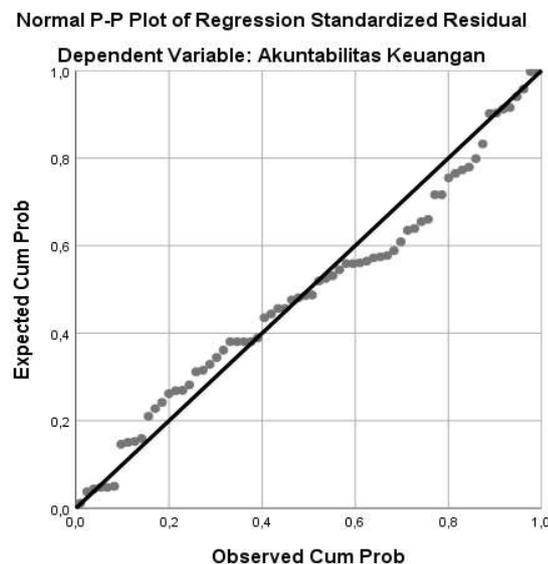
5.1.7 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan sebagai syarat dalam menggunakan model regresi agar hasil regresi yang diperoleh merupakan estimasi yang tepat.

a. Uji Normalitas

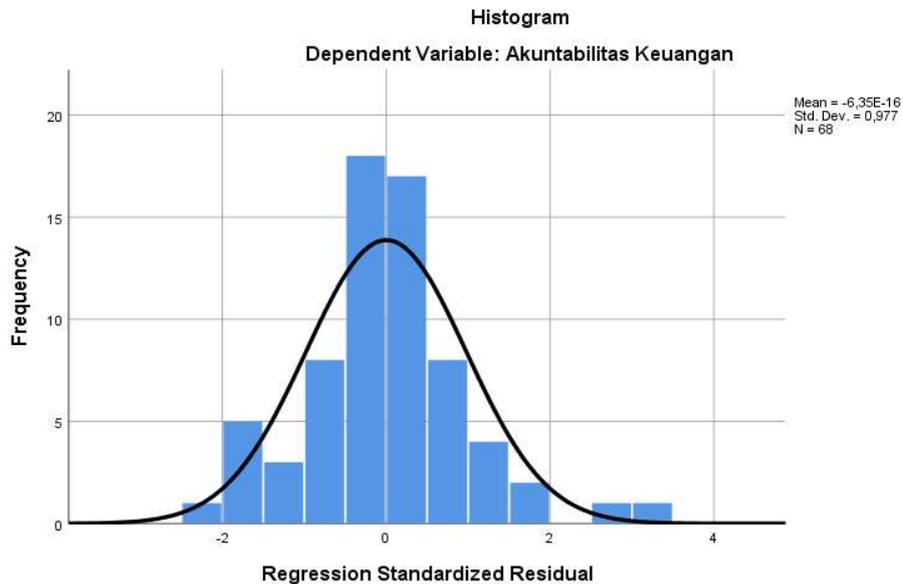
Uji normalitas dapat dilakukan dengan melihat grafik histogram dan *probability plot*. Jika persebaran data pada grafik *probability plot* searah dengan garis diagonal maka data dapat dikatakan terdistribusi dengan normal, atau jika grafik histogramnya menunjukkan dan mengikuti pola distribusi yang normal, maka data dapat dikatakan terdistribusi normal. Hal itu dapat dilihat dari gambar 5.1 dimana persebaran data searah dengan garis diagonal, dan pada gambar 5.2 dapat dilihat bahwa grafik histogram mengikuti pola distribusi yang normal.

Gambar 5.1 Normal Probability Plot



Sumber: Data primer diolah 2021

Gambar 5.2 Grafik Histogram



Sumber: Data primer diolah 2021

Dari grafik di atas dapat dilihat garis histogram mengikuti pola distribusi yang normal dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut telah memenuhi asumsi normalitas. Selain memperhatikan persebaran titik-titik pada probability plot dan grafik histogram, uji normalitas juga dapat dilakukan dengan uji statistik Kolmogorov-Smirnov. Dasar pengambilan keputusannya dapat dilakukan dengan cara melihat nilai signifikansinya, jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka data tersebut terdistribusi normal namun jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka data tersebut tidak terdistribusi normal.

Tabel 5.15 Uji Statistik Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardize d Residual
N		68
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,62000522
Most Extreme Differences	Absolute	,101
	Positive	,101
	Negative	-,066
Test Statistic		,101
Asymp. Sig. (2-tailed)		,082 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data primer diolah 2021

Setelah dilakukan pengujian statistic Kolmmogrov-Smirnov sebagaimana dapat dilihat dari tabel 5.15, maka didapat nilai signifikansi $0,082 > 0,05$, artinya dapat dikatakan bahwa data tersebut terdistribusi dengan normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi atau tidak antar variabel independen. Model regresi yang baik tidak mengalami korelasi antar variabel (bebas dari multikolinearitas). Multikolinearitas ini dapat dilihat dari VIF (Varians Inflation Factor). Jika VIF ≤ 10 maka tingkat multikolinearitas dapat ditoleransi. Apabila besarnya nilai VIF ≤ 10 dan nilai TOL (Tolerance) $\geq 0,10$ maka penelitian tersebut menunjukkan tidak terdapat multikolinearitas.

Tabel 5.16 Uji Multikolinearitas

Model		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,330	3,825		,086	,932		
	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	,396	,094	,420	4,214	,000	,688	1,453
	Transparansi Publik	-,033	,051	-,057	-,645	,521	,877	1,140
	Aktivitas Pengendalian	,533	,111	,462	4,788	,000	,732	1,366

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Keuangan

Sumber: Data primer diolah 2021

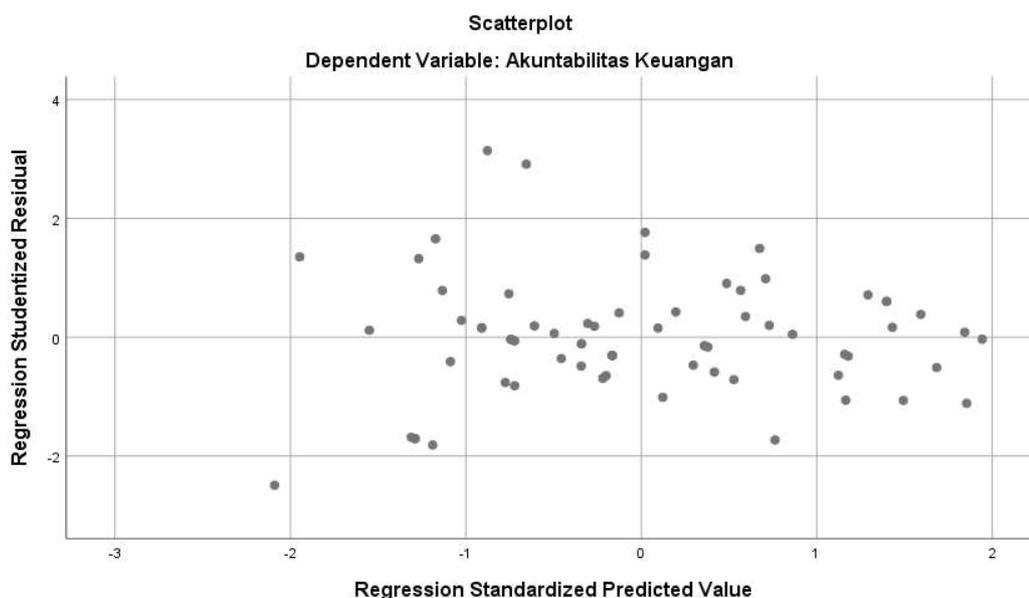
1. Variabel sistem akuntansi keuangan daerah memiliki nilai tolerance $0,688 > 0,1$ dan VIF $1,453 < 10$ maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas.
2. Variabel transparansi publik memiliki nilai tolerance $0,877 > 0,1$ dan VIF $1,140 < 10$ maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas.
3. Variabel aktivitas pengendalian memiliki nilai tolerance $0,732 > 0,1$ dan VIF $1,366 < 10$ maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Uji ini dilakukan dengan memerhatikan diagram plot, dan memerhatikan

persebaran titik-titik pada diagram tersebut, titik-titik tersebut harus menyebar diatas, dibawah maupun disekitar angka 0, titik-titik tersebut tidak boleh hanya diatas atau dibawah saja, serta persebaran titik-titik tersebut tidak boleh membentuk pola-pola tertentu seperti mengumpul, menyebar bergelombang, atau membentuk pola-pola tertentu. Setelah dilakukan uji heterokedastisitas maka titik-titik pada diagram plot tersebar dibawah, diatas dan disekitar angka 0, serta tidak membentuk pola-pola tertentu, maka dapat dikatakan bahwa data yang telah terkumpul lolos uji heterokedastisitas hal ini dapat dilihat pada gambar 5.3.

Gambar 5.3 Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data primer diolah 2021

5.1.8 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen dan arah pengaruh apakah positif atau negatif dengan bantuan program SPSS 25. Analisis ini menggunakan variabel independen sistem akuntansi keuangan daerah,

transparansi publik dan aktivitas pengendalian sedangkan variabel dependen penelitian ini adalah akuntabilitas keuangan. Besarnya pengaruh tersebut dapat dilihat pada tabel 5.17 dibawah ini :

Tabel 5.17 Analisis Regresi Linier Berganda

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,330	3,825		,086	,932
	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	,396	,094	,420	4,214	,000
	Transparansi Publik	-,033	,051	-,057	-,645	,521
	Aktivitas Pengendalian	,533	,111	,462	4,788	,000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Keuangan

Sumber: Data primer diolah 2021

Dari tabel 5.17 diatas dapat disusun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 0,330 + 0,396X_1 - 0,033X_2 + 0,533X_3 + e$$

Dimana:

Y = Akuntabilitas Keuangan

X₁ = Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

X₂ = Transparansi Publik

X₃ = Aktivitas Pengendalian

β = Koefisien Regresi

α = Konstanta

e = Error Term

Berdasarkan hasil pengamatan regresi linier berganda di atas dapat menjelaskan bahwa:

- a. Nilai konstanta yang diperoleh sebesar 0,330. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen berupa sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik, dan aktivitas pengendalian mampu memberikan kontribusi dalam mempengaruhi akuntabilitas keuangan (variabel dependen) sebesar 0,330 atau 33%.
- b. Koefisien regresi variabel sistem akuntansi keuangan daerah 0,396. Hal ini berarti bahwa jika sistem akuntansi keuangan daerah mengalami kenaikan 1 satuan maka akuntabilitas keuangan tetap mengalami peningkatan sebesar 0,396 atau sebesar 39,6% tanpa dipengaruhi faktor lainnya.
- c. Koefisien regresi variabel transparansi publik -0,033. Hal ini berarti bahwa jika transparansi publik mengalami kenaikan 1 satuan maka akuntabilitas keuangan tetap mengalami penurunan sebesar 0,033 atau sebesar 3,3% tanpa dipengaruhi faktor lainnya.
- d. Koefisien regresi variabel aktivitas pengendalian 0,533. Hal ini berarti bahwa jika aktivitas pengendalian mengalami kenaikan 1 satuan maka akuntabilitas keuangan tetap mengalami peningkatan sebesar 0,533 atau sebesar 53,3% tanpa dipengaruhi faktor lainnya.

5.1.9 Uji Hipotesis

- a. Uji Signifikansi Parsial (Uji T)

Uji t (Uji Parsial) bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel

dependennya. Pengujian dilakukan dengan membandingkan antara nilai t hitung masing-masing variabel bebas dengan nilai t tabel dengan peluang kesalahan 5% ($\alpha = 0,05$). Apabila nilai $t_{hitung} \geq t_{tabel}$, maka variabel bebasnya secara individu memberikan pengaruh terhadap variabel terikat. Begitu pun jika tingkat signifikannya, apabila lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima. Selain itu, uji ini dapat sekaligus digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel bebas tersebut mempengaruhi akuntabilitas keuangan, dengan melihat nilai t masing-masing variabel. Berdasarkan nilai t, maka dapat diketahui variabel bebas mana yang memiliki pengaruh paling dominan atau signifikan terhadap variabel terikat. Adapun hasil pengujiannya sebagai berikut:

Tabel 5.18 Uji Parsial (Uji T)

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	,330	3,825		,086	,932
	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	,396	,094	,420	4,214	,000
	Transparansi Publik	-,033	,051	-,057	-,645	,521
	Aktivitas Pengendalian	,533	,111	,462	4,788	,000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Keuangan

Sumber: Data primer diolah 2021

Berdasarkan hasil pengamatan pada tabel 5.18 dapat menjelaskan bahwa:

1. Pengaruh variabel sistem akuntansi keuangan daerah (X1) terhadap variabel akuntabilitas keuangan (Y)

Berdasarkan tabel 5.18 menunjukkan bahwa nilai t hitung variabel sistem akuntansi keuangan daerah sebesar 4,214 dan tingkat signifikansi sebesar 0,00. Adapun kriteria variabel yang memiliki pengaruh signifikan yaitu ketika nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel dan tingkat signifikansi lebih rendah dari 0,05. T tabel pada penelitian ialah sebesar 1,997. Hal ini menunjukkan bahwa $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ ($4,214 > 1,997$) dan nilai signifikansi sebesar $0,00 < 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel akuntabilitas keuangan (H_a diterima dan H_0 ditolak).

2. Pengaruh variabel transparansi publik (X2) terhadap variabel akuntabilitas keuangan (Y)

Berdasarkan tabel 5.18 menunjukkan bahwa nilai t hitung variabel transparansi publik sebesar -0,645 dan tingkat signifikansi sebesar 0,521. Adapun kriteria variabel yang memiliki pengaruh signifikan yaitu ketika nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel dan tingkat signifikansi lebih rendah dari 0,05. T tabel pada penelitian ialah sebesar 1,997. Hal ini menunjukkan bahwa $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ ($-0,645 < 1,997$) dan nilai signifikansi sebesar $0,521 > 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel transparansi publik tidak berpengaruh terhadap variabel akuntabilitas keuangan (H_a ditolak dan H_0 diterima).

3. Pengaruh variabel aktivitas pengendalian (X3) terhadap variabel akuntabilitas keuangan (Y)

Berdasarkan tabel 5.18 menunjukkan bahwa nilai t hitung variabel aktivitas pengendalian sebesar 4,788 dan tingkat signifikansi sebesar 0,00. Adapun kriteria variabel yang memiliki pengaruh signifikan yaitu ketika nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel dan tingkat signifikansi lebih rendah dari 0,05. T tabel pada penelitian ialah sebesar 1,997. Hal ini menunjukkan bahwa $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ ($4,788 > 1,997$) dan nilai signifikansi sebesar $0,00 < 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel aktivitas pengendalian memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel akuntabilitas keuangan (H_a diterima dan H_0 ditolak).

4. Berdasarkan kolom standardized coefficients beta pada tabel 5.18 dapat ditemukan variabel yang paling berpengaruh dominan diantara variabel independent lainnya. Berdasarkan kolom standardized coefficients beta tersebut menunjukkan bahwa variabel sistem akuntansi keuangan daerah memiliki nilai sebesar 0,420, variabel transparansi publik sebesar -0,057 dan variabel aktivitas pengendalian sebesar 0,462. Hal ini menunjukkan bahwa variabel aktivitas pengendalian merupakan variabel paling dominan yang memiliki pengaruh terhadap variabel akuntabilitas keuangan sebesar 46,2%.

b. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel dependen. Pengujian dilakukan

dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} . Apabila nilai $F_{hitung} \geq$ dari nilai F_{tabel} berarti variabel bebasnya secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap variabel terikat. Sebaliknya, apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka secara bersama-sama variabel bebasnya tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikatnya. Untuk mengetahui signifikan atau tidaknya pengaruh variabel secara bersama-sama terhadap variabel terikat maka digunakan probabilitas atau peluang kesalahan 5% ($\alpha = 0,05$). Jika probabilitas $< \alpha$ (0,05), maka hipotesis diterima. Adapun hasil pengujiannya sebagai berikut:

Tabel 5.19 Uji Simultan (Uji F)

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	592,598	3	197,533	27,488	,000 ^b
	Residual	459,917	64	7,186		
	Total	1052,515	67			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Keuangan

b. Predictors: (Constant), Aktivitas Pengendalian, Transparansi Publik, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sumber: Data primer diolah 2021

Berdasarkan tabel 5.19 menunjukkan bahwa nilai F hitung seluruh variabel independent sebesar 27,488 dan tingkat signifikansi sebesar 0,00. Adapun kriteria dalam uji simultan ini ialah ketika seluruh variabel independent memiliki nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel dan tingkat signifikansi lebih rendah dari 0,05. F tabel pada penelitian ini ialah sebesar 2,75. Hal ini menunjukkan bahwa F hitung $>$ F tabel ($27,488 > 2,75$) dan nilai signifikansi sebesar $0,00 < 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi

publik dan aktivitas pengendalian secara simultan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel akuntabilitas keuangan.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ini dilakukan untuk mengukur kemampuan variabel-variabel independen yaitu sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik, dan aktivitas pengendalian dalam menjelaskan dan mempengaruhi variabel dependen yaitu akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Koefisien determinasi dapat dilihat pada kolom R square, yang ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 5.20 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,750 ^a	,563	,543	2,681

a. Predictors: (Constant), Aktivitas Pengendalian, Transparansi Publik, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Keuangan

Sumber: Data primer diolah 2021

Dari tabel 5.20 Nilai R Square sebesar 0,563 atau 56,3%, ini menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang dapat dijelaskan oleh sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik dan aktivitas pengendalian adalah sebesar 56,3 % sedangkan sisanya sebesar 0,437 atau 43,7% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak disertakan dalam model penelitian ini.

5.2 Pembahasan

Hasil uji hipotesis yang didapat berdasarkan penelitian dan pengelolaan data melalui SPSS 25 adalah sebagai berikut:

5.2.1 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Berdasarkan tabel 5.19 menunjukkan bahwa nilai F hitung seluruh variabel independent sebesar 27,488 dan tingkat signifikansi sebesar 0,00. Adapun kriteria dalam uji simultan ini ialah ketika seluruh variabel independent memiliki nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel dan tingkat signifikansi lebih rendah dari 0,05. F tabel pada penelitian ini ialah sebesar 2,75. Hal ini menunjukkan bahwa F hitung > F tabel ($27,488 > 2,75$) dan nilai signifikansi sebesar $0,00 < 0,05$.

Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik dan aktivitas pengendalian secara simultan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel akuntabilitas keuangan. Ketiga variabel ini akan sangat efektif bagi Badan Pengelola Keuangan dan Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan pada tahun-tahun kedepannya. Dengan meningkatkan sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik dan aktivitas pengendalian secara bersama-sama maka bukan tidak mungkin akuntabilitas keuangan akan ikut meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nuzli Rahmatia (2016), Riska Anggraini (2016), Nuzli Rahmatia (2016), Sri Cahyati

(2016), dan Mukhlisul Muzahid, et.al (2019) yang menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik dan aktivitas pengendalian berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas keuangan. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Azima Medina Amrul (2017) yang dilakukan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar mengatakan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik dan aktivitas pengendalian tidak berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas keuangan.

Berdasarkan hasil ini sehingga hipotesis 1 yang menyatakan sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik dan aktivitas pengendalian berpengaruh positif signifikan secara bersama-sama (Simultan) terhadap akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, **diterima**.

5.2.2 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Berdasarkan tabel 5.18 menunjukkan bahwa nilai t hitung variabel sistem akuntansi keuangan daerah sebesar 4,214 dan tingkat signifikansi sebesar 0,00. Adapun kriteria variabel yang memiliki pengaruh signifikan yaitu ketika nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel dan tingkat signifikansi lebih rendah dari 0,05. T tabel pada penelitian ialah sebesar 1,997. Hal ini menunjukkan bahwa $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ ($4,214 > 1,997$) dan nilai signifikansi sebesar $0,00 < 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel sistem akuntansi keuangan daerah memiliki pengaruh

positif signifikan terhadap variabel akuntabilitas keuangan (H_a diterima dan H_0 ditolak).

Hal ini mengindikasikan bahwa semakin meningkatnya variabel sistem akuntansi keuangan daerah maka akan semakin pula meningkatkan variabel akuntabilitas keuangan. Begitu pula sebaliknya, jika variabel sistem akuntansi keuangan daerah menurun, maka tingkat akuntabilitas keuangan juga ikut menurun. Sistem akuntansi pemerintah daerah adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 71 tahun 2010 sistem akuntansi keuangan daerah berbasis akrual. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Sistem akuntansi keuangan daerah dianggap mempengaruhi akuntabilitas keuangan. Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan suatu prosedur dari tahap awal pengumpulan data sampai pelaporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Permendagri No. 64 Tahun 2013). Mardiasmo (2004) mengatakan bahwa untuk menghasilkan laporan keuangan yang relevan, Handal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal. Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk mengambil keputusan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas keuangan. Hasil ini dapat diterima berdasarkan jawaban dari responden yang telah

dirangkum pada tabel frekuensi 5.5. Berdasarkan data tersebut, terdapat beberapa hal yang menyebabkan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan. Sesuai dengan hasil pengumpulan kuesioner menunjukkan bahwa pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat sudah menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. sistem akuntansi keuangan daerah yang dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat sudah meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Berdasarkan hasil tabulasi jawaban responden pada Badan Pengelola Keuangan dan Daerah Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan bahwa mayoritas responden setuju bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah sudah optimal. Berdasarkan data jawaban responden, proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan sudah seluruhnya dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undang. Dengan diterapkannya sistem akuntansi keuangan daerah yang memadai, maka dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati Soleha (2014), Rasuli, et.al (2015), Dewi Yuli Angraini (2016), Dewi Yuli Angraini (2016), Nuzli Rahmatia (2016), Asfiryati, et.al (2017) Mukhlisul Muzahid et.al (2019), Zeny Antika, et.al (2020) dan Ria Herlina, et.al (2021) yang menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan

terhadap akuntabilitas keuangan. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sri Cahyati (2016), Riska Anggraini (2016), Azima Medina Amrul (2017), dan Mulyanto, et.al (2020) mengatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.

Berdasarkan hasil ini sehingga hipotesis 2 yang menyatakan sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik dan aktivitas pengendalian berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, **diterima.**

5.2.3 Pengaruh Transparansi Publik terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Berdasarkan tabel 5.18 menunjukkan bahwa nilai t hitung variabel transparansi publik sebesar $-0,645$ dan tingkat signifikansi sebesar $0,521$. Adapun kriteria variabel yang memiliki pengaruh signifikan yaitu ketika nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel dan tingkat signifikansi lebih rendah dari $0,05$. T tabel pada penelitian ialah sebesar $1,997$. Hal ini menunjukkan bahwa t hitung $< t$ tabel ($-0,645 < 1,997$) dan nilai signifikansi sebesar $0,521 > 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel transparansi publik tidak berpengaruh terhadap variabel akuntabilitas keuangan (H_a ditolak dan H_o diterima).

Hasil penelitian ini menunjukkan tidak terdapat pengaruh antara transparansi publik terhadap akuntabilitas keuangan. Pada kenyataannya,

berdasarkan hasil pengumpulan kuesioner, transparansi masih sulit dilakukan, sehingga kebebasan masyarakat untuk mengakses informasi tersebut masih terbatas.

Hal ini mengindikasikan bahwa transparansi atau keterbukaan masih menjadi sesuatu yang mahal, apalagi yang menyangkut informasi atau data tentang keuangan. Hal ini sangat dirasakan oleh beberapa orang yang membutuhkan informasi tersebut, seperti mahasiswa yang melakukan penelitian yang memerlukan data-data tentang keuangan. Bagi para birokrat data keuangan dipandang sebagai rahasia negara yang tidak semua orang boleh mengetahuinya, padahal pada dasarnya keuangan daerah adalah dana publik yang setiap anggota masyarakat berhak mengetahuinya.

Jika berbicara mengenai hasil tabulasi jawaban responden pada Badan Pengelola Keuangan dan Daerah Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan bahwa mayoritas responden tidak setuju terhadap pernyataan mengenai aliran penggunaan dana dari kas setiap SKPD harus disampaikan kepada masyarakat secara terbuka. Para responden juga mayoritas tidak setuju terhadap pernyataan meskipun suara rakyat atau usulan rakyat diakomodasi melalui musrembang, transparansi publik tentang APBD tetap di manipulasi dan pengumuman kebijakan APBD mudah didapatkan oleh publik. Para responden juga mayoritas mengakui bahwa pengumuman pengelolaan APBD kepada masyarakat dapat meningkatkan transparansi. Adapun mengenai informasi yang diberikan kepada publik selama ini tidak dapat meningkatkan pengelolaan transparansi anggaran. responden juga mayoritas menyetujui bahwa akses untuk memperoleh dokumen

publik tentang APBD sulit diperoleh karena birokratis serta transparansi APBD dapat mengakomodasi dan meningkatkan usulan atau suara rakyat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Riska Anggraini (2016), Nuzli Rahmatia (2016), Sri Cahyati (2016) dan Azima Medina Amrul (2017) yang menyatakan bahwa Transparansi Publik tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas Keuangan. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Indah (2014), Dewi Yuli Angraini (2016) dan Ria Herlina, et.al (2021) mengatakan bahwa transparansi publik berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.

Berdasarkan hasil ini sehingga hipotesis 2 yang menyatakan sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik dan aktivitas pengendalian berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, **ditolak.**

5.2.4 Pengaruh Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Berdasarkan tabel 5.18 menunjukkan bahwa nilai t hitung variabel aktivitas pengendalian sebesar 4,788 dan tingkat signifikansi sebesar 0,00. Adapun kriteria variabel yang memiliki pengaruh signifikan yaitu ketika nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel dan tingkat signifikansi lebih rendah dari 0,05. T tabel pada penelitian ialah sebesar 1,997. Hal ini menunjukkan bahwa $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ ($4,788 > 1,997$) dan nilai signifikansi sebesar $0,00 < 0,05$. Jadi dapat

disimpulkan bahwa variabel aktivitas pengendalian memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel akuntabilitas keuangan (H_a diterima dan H_0 ditolak).

Hal ini mengindikasikan bahwa semakin meningkatnya variabel aktivitas pengendalian maka akan semakin pula meningkatkan variabel akuntabilitas keuangan. Begitu pula sebaliknya, jika variabel aktivitas pengendalian menurun, maka tingkat akuntabilitas keuangan juga ikut menurun. Aktivitas pengendalian sangat efektif dan efisien, menyajikan kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, ketaatan atau kepatuhan terhadap perundang-undangan dan peraturan lain untuk mencapai tujuan pengendalian itu sendiri. Anggraini, Anggi, (2016) aktivitas pengendalian yang nantinya dibuat menjadi laporan hasil evaluasi dari aktivitas pengendalian dan seterusnya mengkomunikasikan kejadian yang relevan, handal, dan tepat waktu. Sehingga pemerintah daerah sangat perlu melaksanakan penguatan pemahaman mengenai aktivitas pengendalian internal karena dengan aktivitas pengendalian yang baik maka akuntabilitas keuangan daerah dapat menjadi cepat dan tepat serta penyusunan laporan keuangan daerah dapat menjadi lebih akuntabel.

Berdasarkan hasil tabulasi jawaban responden pada Badan Pengelola Keuangan dan Daerah Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan bahwa mayoritas responden setuju bahwa kebijakan dan prosedur personel yang ada menghasilkan perekrutan atau pengembangan orang yang berkompeten dan dapat dipercaya yang diperlukan untuk mendukung struktur pengendalian intern yang efektif. Adapun pernyataan mengenai personel harus memahami tugas prosedur dalam pekerjaan mereka masing-masing mayoritas responden setuju. Hal tersebut serupa

dengan pernyataan mengenai Setiap transaksi pembelanjaan terdapat nota pembayaran yang disetujui dengan dokumen pendukung untuk setiap cek yang disiapkan para responden mayoritas juga menyetujuinya. Jika membahas mengenai pemisahan tugas antara personel yang memberi persetujuan nota pembayaran dengan personel yang menandatangani cek dan antara personel yang menandatangani cek dengan personel yang mencatat cek maka mayoritas responden menyetujuinya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Soleha (2014), Dewi Yuli Angraini (2016), Mukhlisul Muzahid, et.al (2019) dan Sang Ayu Putu Arie Indraswarawati, et.al (2020) yang menyatakan bahwa aktivitas pengendalian berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nuzli Rahmatia (2016), Riska Anggraini (2016), Sri Cahyati (2016) dan Azima Medina Amrul (2017) mengatakan bahwa aktivitas pengendalian tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.

Berdasarkan hasil ini sehingga hipotesis 2 yang menyatakan sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik dan aktivitas pengendalian berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, **diterima.**

5.2.5 Variabel yang berpengaruh paling dominan terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Berdasarkan kolom standardized coefficients beta pada tabel 5.18 dapat ditemukan variabel yang paling berpengaruh dominan diantara variabel independent lainnya. Berdasarkan kolom standardized coefficients beta tersebut menunjukkan bahwa variabel sistem akuntansi keuangan daerah memiliki nilai sebesar 0,420, variabel transparansi publik sebesar -0,057 dan variabel aktivitas pengendalian sebesar 0,462. Hal ini menunjukkan bahwa variabel aktivitas pengendalian merupakan variabel paling dominan yang memiliki pengaruh terhadap variabel akuntabilitas keuangan sebesar 46,2%. Hal ini mengindikasikan bahwa aktivitas pengendalian memiliki pengaruh yang sangat vital dalam sebuah akuntabilitas keuangan. Aktivitas pengendalian yang berkualitas ialah aktivitas pengendalian yang telah memiliki pengendalian yang baik dan terarah. Tanpa suatu aktivitas pengendalian yang berkualitas maka sistem akuntansi keuangan daerah maupun transparansi publik tidak akan terarah dan tertata dengan baik.

BAB VI

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini menguji 3 (tiga) hipotesis dengan menggunakan Multiple Regression dengan alat bantu Statistical Package for the Social Science (SPSS), dimana penelitian dilaksanakan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara simultan variabel sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik dan aktivitas pengendalian berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel sistem akuntansi keuangan daerah dan aktivitas pengendalian berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat sedangkan variabel transparansi publik tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Aktivitas pengendalian menjadi variabel yang paling dominan dibandingkan dengan sistem akuntansi keuangan daerah dan transparansi publik. Hal ini mengindikasikan bahwa komitmen aktivitas pengendalian yang baik dan terarah menjadi inti dari akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam satu periode.

6.2 Implikasi

Hasil penelitian ini memberikan implikasi baik secara teoritis maupun praktis dalam bidang pengelolaan anggaran daerah seperti:

- a. Diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi penambahan literatur atau referensi dalam ilmu manajemen khususnya dalam sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik serta aktivitas pengendalian dalam akuntabilitas keuangan.
- b. Penelitian ini menjadi masukan bagi perkembangan ilmu akuntabilitas keuangan, serta dapat memberikan gambaran mengenai persepsi para pengelola keuangan yang tentu saja pada setiap daerah memiliki gaya dan proses berbeda. Sehingga pemerintah dapat lebih berusaha meningkatkan serta mengevaluasi kembali kebijakan-kebijakan penyusunan anggaran dan standar akuntansi agar dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan pada akhir tahun periode. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan informasi bagi pengembangan ilmu manajemen secara umum.

6.3 Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, secara terperinci dapat dikemukakan saran-saran, baik untuk pengembangan pengetahuan maupun untuk kepentingan praktis. Adapun saran-saran penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagi pihak Pemerintah
 - a. Untuk kemajuan bersama, khususnya pemerintah Provinsi Sulawesi Barat agar senantiasa memaksimalkan sistem akuntansi keuangan daerah

yang dilakukan serta berupaya meningkatkan kompetensi para pengelola keuangan dengan mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, sehingga akuntabilitas keuangan terus mengalami peningkatan.

- b. Mari Bersama kita menumbuhkan transparansi publik dan aktivitas pengendalian bagi pengelola keuangan daerah terhadap tujuan-tujuan organisasi pemerintah sesuai dengan karakteristik akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang memerlukan komitmen tinggi dalam pengelolaan keuangan publik.

2. Bagi Peneliti selanjutnya

- a. Meskipun dalam pengendalian persepsi dan pemahaman orang lain tidaklah mudah, sebaiknya peneliti selanjutnya mampu secara umum menjelaskan secara terperinci dan memberikan penekanan dalam batasan dalam memilih opsi jawaban sesuai dengan keadaan dan kenyataan di lapangan.
- b. Untuk menemukan keakuratan data penelitian, diharapkan peneliti selanjutnya dapat meluaskan objek penelitian, tidak hanya pada satu provinsi dengan rentan waktu yang lebih panjang.
- c. Untuk penelitian yang akan datang disarankan untuk menambahkan variabel independent lainnya selain sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik dan aktivitas pengendalian yang tentunya dapat mempengaruhi variabel dependent akuntabilitas keuangan agar lebih melengkapi penelitian ini karena masih ada variabel-variabel independent

lain diluar penelitian ini yang mungkin bisa mempengaruhi akuntabilitas keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- A Ridwan. (2009). *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Jakarta: Alfabeta
- Abdul Hafiz Tanjung. 2011. *Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Sebuah Tantangan)*.
- Amrul, Azima Medina. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. ISSN:2087 – 4669. Vol. 8 No 1 Juli 2017.
- Anggraini, Anggi. 2016. Pengaruh Return On Assets, Opini Audit, Ukuran Kantor Akuntan Publik dan Umur Perusahaan terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan pada Perusahaan manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2011-2014. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang.
- Anggraini, Riska, 2016. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan pada SKPD Pemerintah Kota Medan (Studi Kasus pada Kecamatan se-Kota Medan). Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara.
- Anggraini, Dewi Yuli. Penerapan Sistem Keuangan Daerah, Transparansi, Aktivitas Pengendalian dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. JOM FEKON, Februari 2016, ISSN: 2355-6854, Vol. 3, No. 1.
- Arens, Alvin A. 2015. *Auditing & Jasa Assurance*. Jakarta: Erlangga
- Bambang Supomo, dan Indriantoro, Nur, 2009, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Edisi Pertama, BPF, Yogyakarta.
- Barton, Allan, 2007. *Accrual Accounting and Budgeting System Issues In Australian Governments*. Australian.
- Cahyati, Sri, 2016. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik, Dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Skpd Di Pemerintahan Kabupaten Asahan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Intervening Dan Pelatihan Kerja Sebagai Variabel Moderating. Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara

- Chabib, Sholeh dan Rochmansjah, Heru 2010, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*. Bandung: Fokusmedia.
- Dewi Priyatno, 2008, *Mandiri Belajar SPSS - Bagi Mahasiswa dan Umum*, Yogyakarta: MediaKom
- Dhaka, 2014. *Ensuring Transparency and Accountability in Financial Sector*. The Financial Express.
- Erlina, Sirojuzilam, Rasdianto. 2012. *Penganggaran dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Universitas Sumatera Utara Press.
- Erlina dan Rasdiato, 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akual*. BramaArdian. Medan.
- Farzad, Kamran and Mostafa, 2012. "Public Accountability and Government Financial Reporting", *African Journal of Bussiness Management* Vol 6(29),pp.8475-8482.
- Fikri, Aida. 2015. "*Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada seluruh SKPD di Provinsi Sumatera Utara)*". Skripsi: Universitas Sumatera Utara.
- Ghozali, Imam. 2011. "*Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul, 2012. *Akuntkuncoroansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat; Jakarta
- Halim, Abdul, 2019. *Pengelolaan Keuangan Daerah (Edisi Keenam)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Herlina, Ria, Taufik, Taufeni dan Nasir, Azwir, (2021). *Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi*. *Journal of Economic Bussines and Accounting (COSTING)* 4(2):419-433 DOI:10.31539/costing.v4i2.1965 Universitas Riau.
- Husein Umar. 2013. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali
- Indraswarawati, Sang Ayu Putu Arie, Cokorda Gede Bayu Putra dan I Putu Teresna Jaya Manggala (2020), *Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Gianyar*. Universitas Hindu Indonesia Denpasar Vol 2 No 1 (2020): Widya Akuntansi dan Keuangan

- Laura & Manuel, 2015. "Determining Factors Of Transparency And Accountability in Local Governments: A Meta-Analytic Study". *Journal Of Local Self-Government: Lex Localis*.
- Mahmudi, 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta. STIE YKPN.
- Mamesah, D J, 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Pustaka Utama
- Mardiasmo, 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Muda, I, & Rasdianto, M. S. L. (2014). Implementation of the Cash Revenue System: A Case Study in the Local Government Task Forces' Units of North Sumatera Province, Indonesia. *Information Management & Business Review*, 6(2).
- Muda, I, & Abykusno, D. (2015). Impact Of Region Financial Information System (SIKD) Quality, Role Ambiguity and Training of Precision Of Financial Statement Of Local Government Presentation in North Sumatra, 6(13)
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Edisi 3. Penerbit Erlangga.
- Mudrajad Kuncoro, 2011. *Metode Kuantitatif; Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*, Edisi keempat. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Muzahid, Mukhlisul, M. Yazid AR, Rusdy dan Husin, Dasmi, (2019). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan pada SKPD Kabupaten Aceh Utara. *Prosiding Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe Vol 3, No 1 (2019)*
- Nurhayati, Soleha. 2014. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan: Studi Kasus Pada SKPD Kabupaten/Kota Propinsi Banten. *Jurnal Ekonomi Volume 13 No. 1*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Rahmatia, Nuzli, 2016. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintahan Kota Medan. *Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara*.

- Rasdianto, N., & Muda, I. (2014). Analysis on the Timeliness of the Accountability Report by the Treasurer Spending in Task Force Units in Indonesia. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*, 4(4), 176-190.
- Rizki, Hidayati. (2015), "Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, *Value For Money*, Kejujuran, Transparansi, dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kajian Pada Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu)". Skripsi: Universitas Sumatera Utara.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/Pmk.06/2005 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- Renyowijoyo Munindro. 2013. Akuntansi Sektor Publik (Edisi 3). Jakarta Mitra wacana Media.
- Sangadji, E., M., dan Sopiah, 2010. Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian, Yogyakarta: Andi Offset.
- Saputra, Iskandar. 2014. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada SKPD di Pemerintahan Kabupaten Bintan, Skripsi: Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Shende, Suresh dan Tony Bennet, 2004, Concept Paper 2: "Transparency and Accountability in Public Financial Administration", UN DESA.

- Singarimbun, M & Effendi, S. (2011). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3S.
- Situmorang, S. H. (2008). *Analisis Data Penelitian*. Cetakan Kedua. Medan: USU Press.
- Sitorus, Flora Madaresta. (2019). *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Skpd Kota Tanjungbalai)*. Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Torres, Lourdes, 2004. *Accounting and Accountability: Recent Developments In Government Financial Information Systems*, University of Zaragoza, Spain.

L

A

M

P

I

R

A

N

Lampiran 1

KUESIONER PENELITIAN

Mamuju, 2021

Hal : Permohonan Pengisian Kuesioner
Yth : Bapak/Ibu Responden
Di _ Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul : **“Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik Dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister pada Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nobel Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jumardi

NPM : 2019MM12230

Program Studi : Magister Manajemen

Alamat : BTN Puri Mutiara 1 Blok A1 Nomor 1 Mamuju

Mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu dan Saudara/I sekalian untuk menjadi Responden dan mengisi kuesioner ini sebagai data yang dipergunakan dalam melakukan penelitian. Atas kesediaan dan kerjasamanya, saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Peneliti,

JUMARDI
2019MM12230

**PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH,
TRANSPARANSI PUBLIK DAN AKTIVITAS PENGENDALIAN
TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN PADA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI
SULAWESI BARAT**

Kuesioner ini digunakan sepenuhnya untuk kepentingan penelitian dan pendidikan dan tidak ada unsur yang menyesatkan dalam penggunaannya. Isilah form yang disediakan dengan jujur.

Identitas Diri

1. Nama : (boleh tidak diisi)
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki Perempuan
3. Usia : Tahun
4. Nama SKPD (Bidang) :
5. Jabatan :
6. Pangkat/Golongan :
7. Pendidikan Terakhir : SMA/SMK Diploma S1
 S2 S3
8. Lama Bekerja : Tahun

Petunjuk pengisian kuesioner

Bapak/Ibu diminta untuk menjawab pertanyaan dibawah ini, kemudian dimohon menjawab pertanyaan tersebut dengan memberi check list (√) pada tabel yang sudah tersedia dengan memilih:

- SS : Sangat Setuju
S : Setuju
N : Netral
TS : Tidak Setuju
STS : Sangat Tidak Setuju

1. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)

No	Pertanyaan	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
Kesesuaian sistem akuntansi keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan						
1	Sistem Akuntansi Keuangan pada Instansi ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.					
Prosedur pencatatan transaksi dilakukan berdasarkan standar pencatatan akuntansi pada umumnya						
2	Setiap transaksi keuangan pada Instansi ini dilakukan dengan analisis transaksi / identifikasi transaksi.					
3	Pada Instansi ini dilaksanakan pengidentifikasian terhadap pencatatan.					
4	Setiap transaksi keuangan pada Instansi ini didukung oleh bukti transaksi.					
5	Pada Instansi ini semua transaksi keuangan dilakukan pencatatan secara kronologis.					
6	Pada Instansi ini dilakukan Pengklasifikasian terhadap transaksi yang terjadi.					
7	Pada Instansi ini dilakukan klasifikasi atau transaksi sesuai dengan pos-pos semestinya.					
8	Sistem pengendalian dilakukan dalam mengukur dan melaporkan pencatatan.					
Pembuatan laporan keuangan dan di laporkan secara periodik						
9	Pembuatan laporan keuangan dilakukan setiap periode akuntansi.					
10	Pelaporan laporan keuangan dilakukan secara konsisten dan periodik.					

2. Transparansi Publik (X2)

No	Pertanyaan	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
Transparansi dalam Pengelolaan APBD						
1	Menurut saya, pengumuman pengelolaan APBD kepada masyarakat dapat meningkatkan transparansi.					
2	Meskipun suara rakyat atau usulan rakyat diakomodasi melalui musrembang, transparansi publik tentang APBD tetap di manipulasi.					
3	Musrembang dapat meningkatkan kebijakan transparansi APBD.					
4	Transparansi APBD dapat mengakomodasi dan meningkatkan usulan atau suara rakyat.					
5	Pengumuman tentang APBD bisa didapat setiap waktu.					
6	Pengumuman kebijakan APBD mudah didapatkan oleh publik.					
Keterbukaan dalam penerimaan dan penggunaan dana di SKPD						
7	Informasi yang diberikan kepada publik selama ini menurut saya tidak dapat meningkatkan pengelolaan transparansi anggaran.					
8	Aliran penggunaan dana dari kas setiap SKPD harus disampaikan kepada masyarakat secara terbuka.					
Kemudahan mengakses data						
9	Akses untuk memperoleh dokumen publik tentang APBD sulit diperoleh karena birokratis.					
Sistem komunikasi organisasi						
10	Sistem komunikasi organisasi pada pemerintahan harus melakukan sosialisasi program kebijakan kepada masyarakat secara terbuka.					

3. Aktivitas Pengendalian (X3)

No	Pertanyaan	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
Harus sesuai prinsip akuntansi						
1	Pemilihan prinsip akuntansi dan pengembangan estimasi akuntansi konsisten dengan tujuan dan pelaporan yang wajar.					
Perekrutan dan pengembangan SDM						
2	Kebijakan dan prosedur personel yang ada menghasilkan perekrutan atau pengembangan orang yang berkompeten dan dapat dipercaya yang diperlukan untuk mendukung struktur pengendalian intern yang efektif.					
Tugas prosedur dalam pekerjaan						
3	Personel harus memahami tugas prosedur dalam pekerjaan mereka masing-masing.					
Kesesuaian						
4	Setiap transaksi pembelanjaan terdapat nota pembayaran yang disetujui dengan dokumen pendukung untuk setiap cek yang disiapkan.					
Pemisahan tugas						
5	Hanya personel yang mempunyai orientasi yang diizinkan untuk menandatangani cek.					
6	Penandatanganan cek dengan memeriksa kesesuaian dari detail cek nota pembayaran sebelum menandatangani.					
7	Terdapat pemisahan tugas antara : Personel yang memberi persetujuan nota pembayaran dan personel yang menandatangani cek, antara personel yang menandatangani cek dan personel yang mencatat cek.					
Independen						
8	Pengecekan independen atas kesesuaian iktisar cek harian yang diterbitkan dengan jurnal untuk pengeluaran kas.					

4. Akuntabilitas Keuangan(Y)

No	Pertanyaan	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
Perencanaan						
1	Pemerintah Daerah telah melaksanakan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan dan Pengembangan) yang merupakan bagian dari tahapan pengelolaan keuangan daerah yang melibatkan semua unsur-unsur masyarakat.					
Manfaat						
2	Kepentingan publik dan golongan menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.					
Tanggung jawab						
3	Pemerintah Daerah telah mampu menjelaskan, menjawab dan mempertanggung jawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional kepada publik melalui Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah yang telah diperiksa oleh BPK dan disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya 6 bulan setelah berakhir tahun anggaran.					
4	Pemerintah Daerah telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menilai Kinerja Pemerintah Daerah dan menerima saran masyarakat untuk kinerja pemerintah selanjutnya.					
5	Indikator hasil kinerja yang akan dicapai di tetapkan dan telah digunakan untuk mengevaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah.					
6	Proses dan pertanggung jawaban Pengelolaan Keuangan Daerah diawasi secara terus menerus oleh pengawas intern maupun ekstern.					
Laporan						
7	Dalam Hal Perencanaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah telah memperhitungkan Cost and Benefit Analysis yang tidak terbatas dari segi ekonomi tetapi juga sosial dan sebagainya.					
Prosedur						
8	Pemerintah Daerah telah memiliki prosedur hukum dan pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai landasan dalam Pembuatan keputusan administrasi publik yang harus dihormati oleh para pegawai sipil dan otoritas publik.					

Lampiran 2

TABULASI DATA**Daftar Responden**

No	JK	Usia	Pangkat / Golongan	MK	Pendidikan
1	L	44 Tahun	Penata / III.c	13 Tahun	S2
2	P	44 Tahun	Penata / III.c	11 Tahun	S1
3	L	38 Tahun	Penata muda / III.a	10 Tahun	S1
4	P	39 Tahun	Pengatur / II.c	10 Tahun	SMA/SMK
5	P	45 Tahun	Penata muda / III.a	10 Tahun	S1
6	P	40 Tahun	Pengatur / II.c	11 Tahun	SMA/SMK
7	P	35 Tahun	Penata Muda Tk.I / III.b	11 Tahun	S1
8	P	42 Tahun	Penata Tk.I / III.d	18 Tahun	S2
9	L	46 Tahun	Pengatur Tk.I / II.d	20 Tahun	SMA/SMK
10	P	39 Tahun	Penata muda / III.a	6 Tahun	S1
11	P	38 Tahun	Pengatur / II.c	11 Tahun	SMA/SMK
12	L	34 Tahun	Pengatur / II.c	1 Tahun	Diploma
13	P	50 Tahun	Penata / III.c	14 Tahun	S1
14	P	29 Tahun	Penata Muda Tk.I / III.b	7 Tahun	S1
15	L	28 Tahun	Penata Muda Tk.I / III.b	6 Tahun	S1
16	L	39 Tahun	Penata Muda Tk.I / III.b	11 Tahun	S1
17	P	40 Tahun	Penata / III.c	16 Tahun	S1
18	P	33 Tahun	Penata Muda Tk.I / III.b	6 Tahun	S1
19	P	34 Tahun	Penata muda / III.a	10 Tahun	Diploma
20	L	33 Tahun	Penata muda / III.a	11 Tahun	Diploma
21	L	42 Tahun	Penata Tk.I / III.d	13 Tahun	S2
22	L	42 Tahun	Pembina Tk.I / IV.b	22 Tahun	S2
23	L	38 Tahun	Penata Muda Tk.I / III.b	16 Tahun	S1
24	P	29 Tahun	Penata muda / III.a	2 Tahun	S1
25	L	36 Tahun	Penata / III.c	11 Tahun	S1
26	P	31 Tahun	Penata Muda Tk.I / III.b	10 Tahun	S1
27	P	35 Tahun	Penata / III.c	10 Tahun	S2
28	P	40 Tahun	Penata Tk.I / III.d	12 Tahun	S2
29	L	38 Tahun	Penata / III.c	10 Tahun	S2
30	L	36 Tahun	Penata / III.c	10 Tahun	S1
31	L	47 Tahun	Penata Tk.I / III.d	13 Tahun	S1
32	L	40 Tahun	Penata / III.c	12 Tahun	S2

33	L	37 Tahun	Penata muda / III.a	10 Tahun	S1
34	L	49 Tahun	Pembina Tk.I / IV.b	27 Tahun	S2
35	L	48 Tahun	Penata muda / III.a	11 Tahun	S1
36	L	40 Tahun	Pembina / IV.a	13 Tahun	S2
37	L	52 Tahun	Penata / III.c	10 Tahun	S1
38	P	50 Tahun	Penata Muda Tk.I / III.b	14 Tahun	S1
39	L	31 Tahun	-	-	S1
40	L	49 Tahun	Penata / III.c	10 Tahun	S1
41	L	35 Tahun	-	-	S1
42	L	50 Tahun	Penata Tk.I / III.d	24 Tahun	S1
43	P	44 Tahun	Penata / III.c	10 Tahun	S1
44	L	44 Tahun	Penata / III.c	10 Tahun	S2
45	P	53 Tahun	Pembina / IV.a	19 Tahun	S2
46	L	40 Tahun	Penata / III.c	11 Tahun	S1
47	L	41 Tahun	Penata muda / III.a	10 Tahun	S1
48	P	44 Tahun	Penata Muda Tk.I / III.b	11 Tahun	S1
49	P	31 Tahun	-	-	SMA/SMK
50	L	43 Tahun	Penata / III.c	11 Tahun	S1
51	L	44 Tahun	Penata muda / III.a	7 Tahun	S1
52	P	39 Tahun	Penata Muda Tk.I / III.b	11 Tahun	S1
53	L	39 Tahun	-	-	S1
54	P	36 Tahun	Penata muda / III.a	6 Tahun	S1
55	L	37 Tahun	Penata Muda Tk.I / III.b	12 Tahun	S1
56	L	45 Tahun	Penata muda / III.a	11 Tahun	Diploma
57	P	37 Tahun	Penata muda / III.a	12 Tahun	Diploma
58	P	37 Tahun	Penata Tk.I / III.d	18 Tahun	S2
59	P	37 Tahun	Penata / III.c	11 Tahun	S2
60	P	46 Tahun	Penata / III.c	11 Tahun	S1
61	P	25 Tahun	Penata muda / III.a	2 Tahun	S1
62	L	36 Tahun	Pengatur / II.c	10 Tahun	SMA/SMK
63	L	49 Tahun	Pembina / IV.a	21 Tahun	S1
64	P	40 Tahun	Penata / III.c	15 Tahun	S1
65	L	35 Tahun	Penata muda / III.a	11 Tahun	S1
66	L	38 Tahun	Penata / III.c	12 Tahun	S1
67	P	35 Tahun	Pengatur Muda / II.a	7 Tahun	SMA/SMK
68	L	42 Tahun	Penata Tk.I / III.d	18 Tahun	S2

Jawaban Responden terhadap Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

No	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)										Total X1
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	
1	5	5	4	4	4	4	5	5	4	4	44
2	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	42
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	4	43
5	5	4	4	5	4	4	4	4	4	4	42
6	5	4	4	5	4	4	5	4	4	4	43
7	5	4	4	5	4	4	5	4	4	4	43
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
13	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
14	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
17	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
18	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	49
19	4	4	5	5	4	5	4	4	5	4	44
20	4	5	4	4	4	5	4	4	5	5	44
21	4	4	4	5	5	5	3	4	4	5	43
22	5	5	4	5	4	4	5	5	4	4	45
23	5	4	4	5	4	5	5	4	4	5	45
24	4	5	5	5	4	4	4	4	5	5	45
25	5	4	4	5	4	5	4	5	5	5	46
26	5	4	4	5	4	5	4	5	5	5	46
27	4	4	3	5	5	3	3	4	5	4	40
28	5	4	3	3	3	4	4	3	5	5	39
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
30	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3	35
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
33	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
34	5	4	5	5	4	4	5	4	5	5	46
35	5	3	4	4	5	4	3	2	4	4	38
36	4	4	3	5	4	4	3	4	5	3	39
37	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	48

38	4	3	4	3	3	2	2	2	3	5	31
39	5	2	5	5	5	5	3	5	1	5	41
40	4	2	4	4	2	2	4	2	4	4	32
41	5	2	4	4	4	4	2	4	2	4	35
42	5	2	4	4	3	3	2	2	3	4	32
43	5	2	4	4	3	2	2	2	2	4	30
44	5	2	4	4	3	2	2	2	2	4	30
45	3	4	4	3	3	2	2	4	2	4	31
46	3	4	4	3	3	2	2	4	2	4	31
47	3	4	4	3	3	4	4	4	2	4	35
48	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	29
49	3	2	3	3	3	3	3	2	3	4	29
50	4	1	4	4	2	2	3	1	1	4	26
51	3	4	4	3	3	4	2	4	2	4	33
52	3	1	4	4	1	3	2	4	3	4	29
53	5	1	5	4	4	4	1	3	1	5	33
54	4	3	4	3	3	3	4	3	4	4	35
55	4	2	4	4	4	4	4	1	2	4	33
56	4	1	5	4	4	3	2	5	5	4	37
57	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
58	5	4	5	4	2	2	4	2	2	5	35
59	5	5	5	4	4	4	5	2	5	4	43
60	4	4	4	4	4	4	5	4	5	4	42
61	3	3	5	4	5	4	3	3	4	4	38
62	5	5	5	2	2	2	4	1	5	5	36
63	4	2	4	2	2	2	2	2	2	4	26
64	2	2	5	4	2	2	2	2	4	4	29
65	4	2	5	4	2	2	4	1	1	4	29
66	2	2	4	4	2	2	4	2	4	4	30
67	1	4	4	4	4	4	2	1	2	4	30
68	2	4	5	4	2	2	2	2	4	5	32

Jawaban Responden terhadap Aktivitas Pengendalian

No	Aktivitas Pengendalian (X3)								Total X3
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	
1	4	4	4	4	4	4	4	4	32
2	4	4	5	4	4	4	4	4	33
3	4	4	4	4	4	4	4	4	32
4	4	4	5	4	4	4	4	4	33
5	4	4	4	4	4	4	4	4	32
6	4	4	5	4	4	4	4	4	33
7	4	4	5	4	4	4	4	4	33
8	4	4	5	4	5	5	4	4	35
9	4	2	4	4	4	4	4	4	30
10	4	4	4	4	4	4	4	4	32
11	4	4	4	4	4	4	4	4	32
12	4	5	4	5	5	5	5	5	38
13	5	5	5	5	2	2	2	2	28
14	5	4	5	5	4	5	4	5	37
15	5	5	5	5	4	4	4	4	36
16	5	4	4	4	5	5	5	5	37
17	5	5	5	5	5	5	5	5	40
18	5	5	5	5	4	4	4	4	36
19	3	4	4	4	4	5	4	4	32
20	4	4	5	5	4	4	5	5	36
21	4	3	4	5	4	3	3	2	28
22	4	4	5	5	5	4	4	4	35
23	4	5	4	5	5	5	4	4	36
24	4	4	5	5	5	5	4	5	37
25	4	4	4	4	4	4	4	4	32
26	4	4	4	4	4	4	4	4	32
27	5	5	4	5	3	4	4	3	33
28	4	4	4	4	4	4	4	4	32
29	4	4	4	4	4	4	4	4	32
30	4	4	4	3	3	3	4	4	29
31	4	4	4	4	4	4	4	4	32
32	4	4	4	4	4	4	4	4	32
33	5	5	5	5	5	5	5	5	40
34	4	5	5	4	4	4	4	4	34
35	3	4	4	4	5	4	4	3	31
36	2	3	4	5	3	4	4	3	28
37	5	4	5	5	5	5	5	5	39
38	5	4	4	5	5	5	4	4	36

39	5	5	5	5	5	5	5	5	40
40	4	4	5	4	4	4	4	4	33
41	4	4	4	5	5	5	5	4	36
42	4	4	5	4	4	5	4	4	34
43	4	4	5	4	4	5	4	4	34
44	4	4	5	4	4	5	4	4	34
45	3	4	4	4	5	4	4	3	31
46	3	4	4	4	5	4	4	3	31
47	3	4	4	4	5	3	4	5	32
48	4	4	4	4	4	4	4	4	32
49	4	4	4	4	4	5	4	4	33
50	4	4	4	2	2	2	4	2	24
51	3	4	4	4	5	4	4	3	31
52	3	5	4	4	5	4	3	3	31
53	4	5	5	5	5	5	4	4	37
54	5	5	5	5	5	5	5	4	39
55	4	4	4	4	4	4	4	4	32
56	2	4	3	5	4	4	4	4	30
57	4	5	5	5	5	5	5	5	39
58	4	5	5	5	5	5	5	5	39
59	5	5	5	5	5	5	5	5	40
60	5	4	5	5	5	5	4	4	37
61	4	4	5	5	5	5	4	4	36
62	5	5	5	4	4	5	5	5	38
63	4	4	4	4	4	4	4	4	32
64	4	5	5	5	5	5	5	5	39
65	5	4	4	5	5	4	4	4	35
66	4	4	5	4	5	5	5	5	37
67	5	5	4	4	4	5	5	5	37
68	5	4	5	5	4	5	5	5	38

Jawaban Responden terhadap Akuntabilitas Keuangan

No	Akuntabilitas Keuangan (Y)								Total Y
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	
1	4	4	4	4	4	4	4	4	32
2	4	4	4	4	4	4	4	4	32
3	4	4	4	4	4	4	4	4	32
4	4	4	5	4	4	4	4	4	33
5	4	4	4	4	4	4	4	4	32
6	4	4	5	4	4	4	4	4	33
7	4	4	5	4	4	4	4	4	33
8	5	4	5	4	4	4	4	4	34
9	4	4	4	4	4	4	4	4	32
10	5	5	5	5	5	5	5	5	40
11	4	4	4	4	4	4	4	4	32
12	5	5	5	5	5	5	4	4	38
13	4	4	4	4	4	4	4	4	32
14	5	5	5	5	5	5	5	5	40
15	5	5	5	5	5	5	5	5	40
16	5	5	4	4	4	4	4	4	34
17	5	4	5	5	5	5	4	4	37
18	4	4	5	5	4	5	5	5	37
19	4	4	5	5	4	4	4	4	34
20	4	4	4	5	4	4	4	5	34
21	5	4	4	4	4	5	4	5	35
22	5	4	4	4	5	5	4	4	35
23	4	4	4	5	4	4	4	5	34
24	4	4	4	4	4	4	4	4	32
25	5	5	4	5	4	5	5	5	38
26	5	4	5	5	5	5	5	5	39
27	5	4	4	4	4	4	4	4	33
28	5	5	5	5	5	5	5	5	40
29	4	4	4	4	4	4	2	4	30
30	4	4	4	4	4	4	4	4	32
31	4	4	4	4	4	4	4	4	32
32	4	4	4	4	4	4	4	4	32
33	5	5	5	5	5	5	5	5	40
34	5	4	5	4	4	5	4	4	35
35	4	4	4	2	2	4	4	2	26
36	5	4	2	4	4	5	2	4	30
37	5	5	5	5	5	5	5	5	40
38	5	5	5	4	4	4	4	4	35

39	5	5	5	5	5	5	5	5	40
40	4	4	4	4	4	4	4	4	32
41	4	4	4	4	5	4	5	5	35
42	4	4	4	4	4	5	4	4	33
43	4	4	4	4	4	5	4	4	33
44	4	4	4	4	4	5	4	4	33
45	4	4	4	2	2	4	4	2	26
46	4	4	4	2	2	4	4	2	26
47	4	4	4	5	5	4	4	4	34
48	4	2	4	4	4	4	4	4	30
49	4	2	4	4	4	4	4	4	30
50	2	2	2	4	4	2	2	4	22
51	4	4	4	2	2	4	4	2	26
52	4	4	4	4	4	5	4	4	33
53	4	4	5	4	4	5	5	5	36
54	5	5	5	4	5	5	5	5	39
55	4	4	4	4	4	4	4	4	32
56	4	5	5	4	4	4	4	4	34
57	5	5	5	5	5	5	5	5	40
58	4	5	4	5	4	5	4	4	35
59	4	4	5	5	5	5	4	4	36
60	4	4	5	5	5	4	5	5	37
61	5	4	5	5	4	4	5	5	37
62	4	5	5	5	5	5	5	5	39
63	5	5	5	5	5	5	5	5	40
64	5	4	5	5	4	5	5	5	38
65	4	5	5	5	5	5	4	4	37
66	4	4	5	5	4	4	5	5	36
67	4	4	5	5	5	4	5	5	37
68	5	5	5	5	4	5	5	4	38

Lampiran 3

OUTPUT SPSS VERSI 25

1. DESKRIPSI RESPONDEN

Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

		Jenis Kelamin			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-Laki	37	54,4	54,4	54,4
	Perempuan	31	45,6	45,6	100,0
	Total	68	100,0	100,0	

Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

		Tingkat Pendidikan			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Magister (Strata2)	15	22,1	22,1	22,1
	Sarjana (Strata1)	41	60,3	60,3	82,4
	Diploma (D3)	5	7,4	7,4	89,7
	SMA/SMK	7	10,3	10,3	100,0
	Total	68	100,0	100,0	

Deskripsi Responden Berdasarkan Masa Kerja

		Masa Kerja			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 5 Tahun	4	5,9	5,9	5,9
	5 – 10 Tahun	25	36,8	36,8	42,6
	11 – 15 Tahun	28	41,2	41,2	83,8
	16 – 20 Tahun	7	10,3	10,3	94,1
	> 20 Tahun	4	5,9	5,9	100,0
	Total	68	100,0	100,0	

2. ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	68	35	50	42,91	4,206
Transparansi Publik	68	20	50	35,10	6,861
Aktivitas Pengendalian	68	24	40	34,06	3,438
Akuntabilitas Keuangan	68	22	40	34,31	3,963
Valid N (listwise)	68				

Deskripsi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)

X1.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	1	1,5	1,5	1,5
	4	35	51,5	51,5	52,9
	5	32	47,1	47,1	100,0
	Total	68	100,0	100,0	

X1.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	7	10,3	10,3	10,3
	4	45	66,2	66,2	76,5
	5	16	23,5	23,5	100,0
	Total	68	100,0	100,0	

X1.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	5	7,4	7,4	7,4
	4	42	61,8	61,8	69,1
	5	21	30,9	30,9	100,0
	Total	68	100,0	100,0	

X1.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	2	2,9	2,9	2,9
	4	28	41,2	41,2	44,1
	5	38	55,9	55,9	100,0
	Total	68	100,0	100,0	

X1.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	5	7,4	7,4	7,4
	4	40	58,8	58,8	66,2
	5	23	33,8	33,8	100,0
	Total	68	100,0	100,0	

X1.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	4	5,9	5,9	5,9
	4	41	60,3	60,3	66,2
	5	23	33,8	33,8	100,0
	Total	68	100,0	100,0	

X1.7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	12	17,6	17,6	17,6
	4	32	47,1	47,1	64,7
	5	24	35,3	35,3	100,0
	Total	68	100,0	100,0	

X1.8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	4	5,9	5,9	5,9
	3	2	2,9	2,9	8,8
	4	42	61,8	61,8	70,6
	5	20	29,4	29,4	100,0
	Total	68	100,0	100,0	

X1.9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	1	1,5	1,5	1,5
	4	42	61,8	61,8	63,2
	5	25	36,8	36,8	100,0
	Total	68	100,0	100,0	

X1.10

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	3	4,4	4,4	4,4
	4	39	57,4	57,4	61,8
	5	26	38,2	38,2	100,0
	Total	68	100,0	100,0	

Deskripsi Transparansi Publik (X2)**X2.1**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	1	1,5	1,5	1,5
	2	7	10,3	10,3	11,8
	3	14	20,6	20,6	32,4
	4	24	35,3	35,3	67,6
	5	22	32,4	32,4	100,0
	Total	68	100,0	100,0	

X2.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	4	5,9	5,9	5,9
	2	22	32,4	32,4	38,2
	3	11	16,2	16,2	54,4
	4	26	38,2	38,2	92,6
	5	5	7,4	7,4	100,0
	Total	68	100,0	100,0	

X2.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	7	10,3	10,3	10,3
	2	21	30,9	30,9	41,2
	3	8	11,8	11,8	52,9
	4	19	27,9	27,9	80,9
	5	13	19,1	19,1	100,0
	Total	68	100,0	100,0	

X2.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	7	10,3	10,3	10,3
	2	15	22,1	22,1	32,4
	3	14	20,6	20,6	52,9
	4	20	29,4	29,4	82,4
	5	12	17,6	17,6	100,0
	Total	68	100,0	100,0	

X2.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	5	7,4	7,4	7,4
	2	22	32,4	32,4	39,7
	3	13	19,1	19,1	58,8
	4	16	23,5	23,5	82,4
	5	12	17,6	17,6	100,0
	Total	68	100,0	100,0	

X2.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	1	1,5	1,5	1,5
	2	3	4,4	4,4	5,9
	3	4	5,9	5,9	11,8
	4	39	57,4	57,4	69,1
	5	21	30,9	30,9	100,0
	Total	68	100,0	100,0	

X2.7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	3	4,4	4,4	4,4
	3	1	1,5	1,5	5,9
	4	46	67,6	67,6	73,5
	5	18	26,5	26,5	100,0
	Total	68	100,0	100,0	

X2.8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	4	5,9	5,9	5,9
	3	12	17,6	17,6	23,5
	4	39	57,4	57,4	80,9
	5	13	19,1	19,1	100,0
	Total	68	100,0	100,0	

X2.9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	1	1,5	1,5	1,5
	2	17	25,0	25,0	26,5
	3	24	35,3	35,3	61,8
	4	16	23,5	23,5	85,3
	5	10	14,7	14,7	100,0
	Total	68	100,0	100,0	

X2.10

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	24	35,3	35,3	35,3
	3	15	22,1	22,1	57,4
	4	18	26,5	26,5	83,8
	5	11	16,2	16,2	100,0
	Total	68	100,0	100,0	

Deskripsi Aktivitas Pengendalian (X3)

X3.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	2	2,9	2,9	2,9
	3	7	10,3	10,3	13,2
	4	41	60,3	60,3	73,5
	5	18	26,5	26,5	100,0
	Total	68	100,0	100,0	

X3.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	1	1,5	1,5	1,5
	3	2	2,9	2,9	4,4
	4	46	67,6	67,6	72,1
	5	19	27,9	27,9	100,0
	Total	68	100,0	100,0	

X3.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	1	1,5	1,5	1,5
	4	35	51,5	51,5	52,9
	5	32	47,1	47,1	100,0
	Total	68	100,0	100,0	

X3.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	1	1,5	1,5	1,5
	3	1	1,5	1,5	2,9
	4	37	54,4	54,4	57,4
	5	29	42,6	42,6	100,0
	Total	68	100,0	100,0	

X3.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	2	2,9	2,9	2,9
	3	3	4,4	4,4	7,4
	4	35	51,5	51,5	58,8
	5	28	41,2	41,2	100,0
	Total	68	100,0	100,0	

X3.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	2	2,9	2,9	2,9
	3	3	4,4	4,4	7,4
	4	34	50,0	50,0	57,4
	5	29	42,6	42,6	100,0
	Total	68	100,0	100,0	

X3.7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	1	1,5	1,5	1,5
	3	2	2,9	2,9	4,4
	4	48	70,6	70,6	75,0
	5	17	25,0	25,0	100,0
	Total	68	100,0	100,0	

X3.8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	3	4,4	4,4	4,4
	3	7	10,3	10,3	14,7
	4	40	58,8	58,8	73,5
	5	18	26,5	26,5	100,0
	Total	68	100,0	100,0	

Deskripsi Akuntabilitas Keuangan (Y)

Y.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	1	1,5	1,5	1,5
	4	42	61,8	61,8	63,2
	5	25	36,8	36,8	100,0
	Total	68	100,0	100,0	

Y.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	3	4,4	4,4	4,4
	4	46	67,6	67,6	72,1
	5	19	27,9	27,9	100,0
	Total	68	100,0	100,0	

Y.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	2	2,9	2,9	2,9
	4	34	50,0	50,0	52,9
	5	32	47,1	47,1	100,0
	Total	68	100,0	100,0	

Y.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	4	5,9	5,9	5,9
	4	36	52,9	52,9	58,8
	5	28	41,2	41,2	100,0
	Total	68	100,0	100,0	

Y.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	4	5,9	5,9	5,9
	4	43	63,2	63,2	69,1
	5	21	30,9	30,9	100,0
	Total	68	100,0	100,0	

Y.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	1	1,5	1,5	1,5
	4	37	54,4	54,4	55,9
	5	30	44,1	44,1	100,0
	Total	68	100,0	100,0	

Y.7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	3	4,4	4,4	4,4
	4	43	63,2	63,2	67,6
	5	22	32,4	32,4	100,0
	Total	68	100,0	100,0	

Y.8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	4	5,9	5,9	5,9
	4	40	58,8	58,8	64,7
	5	24	35,3	35,3	100,0
	Total	68	100,0	100,0	

3. UJI INSTRUMEN PENELITIAN

a. Uji Validitas

Uji Validitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	X1
X1.1	Pearson Correlation	1	,488**	,474**	,583**	,372**	,511**	,614**	,398**	,443**	,575**	,760**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,002	,000	,000	,001	,000	,000	,000
	N	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
X1.2	Pearson Correlation	,488**	1	,494**	,479**	,205	,482**	,677**	,626**	,451**	,556**	,776**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,093	,000	,000	,000	,000	,000	,000
	N	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
X1.3	Pearson Correlation	,474**	,494**	1	,395**	,518**	,707**	,480**	,374**	,372**	,580**	,754**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,001	,000	,000	,000	,002	,002	,000	,000
	N	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
X1.4	Pearson Correlation	,583**	,479**	,395**	1	,429**	,420**	,325**	,423**	,381**	,324**	,661**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,001		,000	,000	,007	,000	,001	,007	,000
	N	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
X1.5	Pearson Correlation	,372**	,205	,518**	,429**	1	,578**	,065	,149	,329**	,311**	,540**
	Sig. (2-tailed)	,002	,093	,000	,000		,000	,599	,224	,006	,010	,000
	N	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
X1.6	Pearson Correlation	,511**	,482**	,707**	,420**	,578**	1	,356**	,398**	,477**	,633**	,771**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000		,003	,001	,000	,000	,000
	N	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
X1.7	Pearson Correlation	,614**	,677**	,480**	,325**	,065	,356**	1	,604**	,360**	,445**	,714**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,007	,599	,003		,000	,003	,000	,000
	N	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
X1.8	Pearson Correlation	,398**	,626**	,374**	,423**	,149	,398**	,604**	1	,493**	,381**	,706**
	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,002	,000	,224	,001	,000		,000	,001	,000
	N	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
X1.9	Pearson Correlation	,443**	,451**	,372**	,381**	,329**	,477**	,360**	,493**	1	,616**	,681**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,002	,001	,006	,000	,003	,000		,000	,000
	N	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
X1.10	Pearson Correlation	,575**	,556**	,580**	,324**	,311**	,633**	,445**	,381**	,616**	1	,750**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,007	,010	,000	,000	,001	,000		,000
	N	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
Total X1	Pearson Correlation	,760**	,776**	,754**	,661**	,540**	,771**	,714**	,706**	,681**	,750**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Uji Validitas Transparansi Publik

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.10	X2
X2.1	Pearson Correlation	1	,294*	,340**	,216	,162	,335**	,272*	,206	,294*	,340**	,523**
	Sig. (2-tailed)		,015	,005	,077	,187	,005	,025	,092	,015	,005	,000
	N	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
X2.2	Pearson Correlation	,294*	1	,152	,587**	,580**	,331**	,284*	,183	,276*	,345**	,636**
	Sig. (2-tailed)	,015		,216	,000	,000	,006	,019	,135	,023	,004	,000
	N	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
X2.3	Pearson Correlation	,340**	,152	1	,396**	,420**	,271*	,329**	,420**	,522**	,533**	,697**
	Sig. (2-tailed)	,005	,216		,001	,000	,025	,006	,000	,000	,000	,000
	N	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
X2.4	Pearson Correlation	,216	,587**	,396**	1	,595**	,448**	,420**	,266*	,297*	,292*	,715**
	Sig. (2-tailed)	,077	,000	,001		,000	,000	,000	,028	,014	,016	,000
	N	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
X2.5	Pearson Correlation	,162	,580**	,420**	,595**	1	,393**	,500**	,182	,400**	,367**	,728**
	Sig. (2-tailed)	,187	,000	,000	,000		,001	,000	,138	,001	,002	,000
	N	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
X2.6	Pearson Correlation	,335**	,331**	,271*	,448**	,393**	1	,626**	,371**	,192	,183	,592**
	Sig. (2-tailed)	,005	,006	,025	,000	,001		,000	,002	,117	,136	,000
	N	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
X2.7	Pearson Correlation	,272*	,284*	,329**	,420**	,500**	,626**	1	,324**	,331**	,335**	,632**
	Sig. (2-tailed)	,025	,019	,006	,000	,000	,000		,007	,006	,005	,000
	N	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
X2.8	Pearson Correlation	,206	,183	,420**	,266*	,182	,371**	,324**	1	,420**	,463**	,552**
	Sig. (2-tailed)	,092	,135	,000	,028	,138	,002	,007		,000	,000	,000
	N	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
X2.9	Pearson Correlation	,294*	,276*	,522**	,297*	,400**	,192	,331**	,420**	1	,815**	,704**
	Sig. (2-tailed)	,015	,023	,000	,014	,001	,117	,006	,000		,000	,000
	N	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
X2.10	Pearson Correlation	,340**	,345**	,533**	,292*	,367**	,183	,335**	,463**	,815**	1	,723**
	Sig. (2-tailed)	,005	,004	,000	,016	,002	,136	,005	,000	,000		,000
	N	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
Total X2	Pearson Correlation	,523**	,636**	,697**	,715**	,728**	,592**	,632**	,552**	,704**	,723**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Uji Validitas Aktivitas Pengendalian

Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.8	Total X3
X3.1	Pearson Correlation	1	,395**	,479**	,299*	,026	,268*	,298*	,363**	,579**
	Sig. (2-tailed)		,001	,000	,013	,834	,027	,014	,002	,000
	N	68	68	68	68	68	68	68	68	68
X3.2	Pearson Correlation	,395**	1	,354**	,318**	,202	,268*	,291*	,280*	,558**
	Sig. (2-tailed)	,001		,003	,008	,098	,027	,016	,021	,000
	N	68	68	68	68	68	68	68	68	68
X3.3	Pearson Correlation	,479**	,354**	1	,335**	,179	,360**	,258*	,370**	,599**
	Sig. (2-tailed)	,000	,003		,005	,145	,003	,034	,002	,000
	N	68	68	68	68	68	68	68	68	68
X3.4	Pearson Correlation	,299*	,318**	,335**	1	,428**	,448**	,226	,306*	,619**
	Sig. (2-tailed)	,013	,008	,005		,000	,000	,063	,011	,000
	N	68	68	68	68	68	68	68	68	68
X3.5	Pearson Correlation	,026	,202	,179	,428**	1	,649**	,464**	,477**	,653**
	Sig. (2-tailed)	,834	,098	,145	,000		,000	,000	,000	,000
	N	68	68	68	68	68	68	68	68	68
X3.6	Pearson Correlation	,268*	,268*	,360**	,448**	,649**	1	,647**	,674**	,816**
	Sig. (2-tailed)	,027	,027	,003	,000	,000		,000	,000	,000
	N	68	68	68	68	68	68	68	68	68
X3.7	Pearson Correlation	,298*	,291*	,258*	,226	,464**	,647**	1	,768**	,739**
	Sig. (2-tailed)	,014	,016	,034	,063	,000	,000		,000	,000
	N	68	68	68	68	68	68	68	68	68
X3.8	Pearson Correlation	,363**	,280*	,370**	,306*	,477**	,674**	,768**	1	,803**
	Sig. (2-tailed)	,002	,021	,002	,011	,000	,000	,000		,000
	N	68	68	68	68	68	68	68	68	68
Total X3	Pearson Correlation	,579**	,558**	,599**	,619**	,653**	,816**	,739**	,803**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	68	68	68	68	68	68	68	68	68

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Uji Validitas Akuntabilitas Keuangan

Correlations

		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Total Y
Y.1	Pearson Correlation	1	,594**	,469**	,325**	,355**	,665**	,457**	,346**	,682**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,007	,003	,000	,000	,004	,000
	N	68	68	68	68	68	68	68	68	68
Y.2	Pearson Correlation	,594**	1	,514**	,339**	,335**	,579**	,475**	,278*	,675**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,005	,005	,000	,000	,022	,000
	N	68	68	68	68	68	68	68	68	68
Y.3	Pearson Correlation	,469**	,514**	1	,448**	,403**	,454**	,730**	,386**	,736**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,001	,000	,000	,001	,000
	N	68	68	68	68	68	68	68	68	68
Y.4	Pearson Correlation	,325**	,339**	,448**	1	,832**	,402**	,421**	,842**	,803**
	Sig. (2-tailed)	,007	,005	,000		,000	,001	,000	,000	,000
	N	68	68	68	68	68	68	68	68	68
Y.5	Pearson Correlation	,355**	,335**	,403**	,832**	1	,418**	,370**	,790**	,782**
	Sig. (2-tailed)	,003	,005	,001	,000		,000	,002	,000	,000
	N	68	68	68	68	68	68	68	68	68
Y.6	Pearson Correlation	,665**	,579**	,454**	,402**	,418**	1	,476**	,365**	,711**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,001	,000		,000	,002	,000
	N	68	68	68	68	68	68	68	68	68
Y.7	Pearson Correlation	,457**	,475**	,730**	,421**	,370**	,476**	1	,521**	,746**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,002	,000		,000	,000
	N	68	68	68	68	68	68	68	68	68
Y.8	Pearson Correlation	,346**	,278*	,386**	,842**	,790**	,365**	,521**	1	,789**
	Sig. (2-tailed)	,004	,022	,001	,000	,000	,002	,000		,000
	N	68	68	68	68	68	68	68	68	68
Total Y	Pearson Correlation	,682**	,675**	,736**	,803**	,782**	,711**	,746**	,789**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	68	68	68	68	68	68	68	68	68

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

b. Hasil Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,888	10

Uji Reliabilitas Transparansi Publik

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,845	10

Uji Reliabilitas Aktivitas Pengendalian

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,826	8

Uji Reliabilitas Akuntabilitas Keuangan

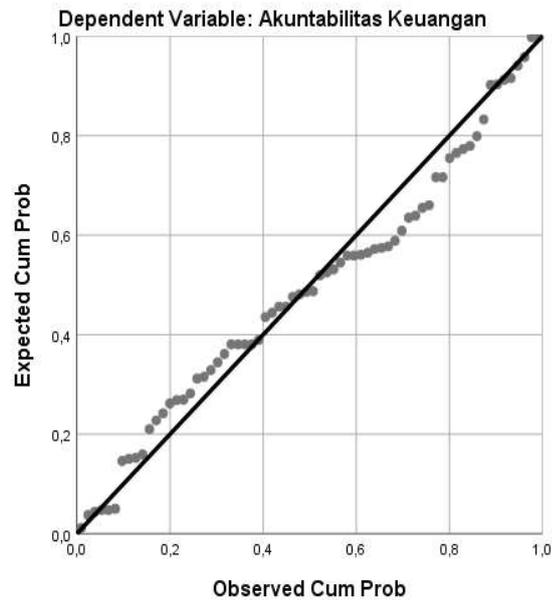
Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,882	8

4. UJI ASUMSI KLASIK

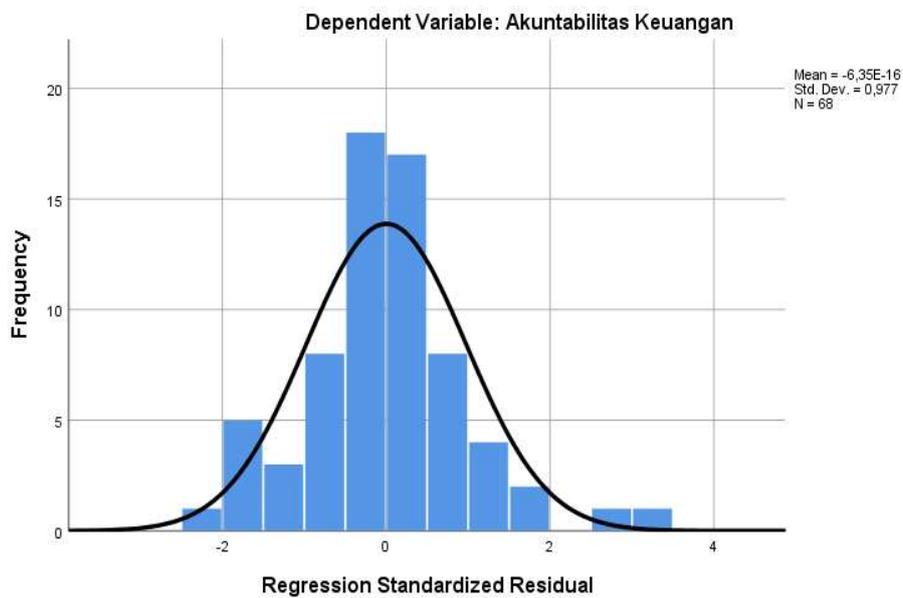
a. Uji Normalitas

Uji normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Histogram



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		68
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,62000522
Most Extreme Differences	Absolute	,101
	Positive	,101
	Negative	-,066
Test Statistic		,101
Asymp. Sig. (2-tailed)		,082 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

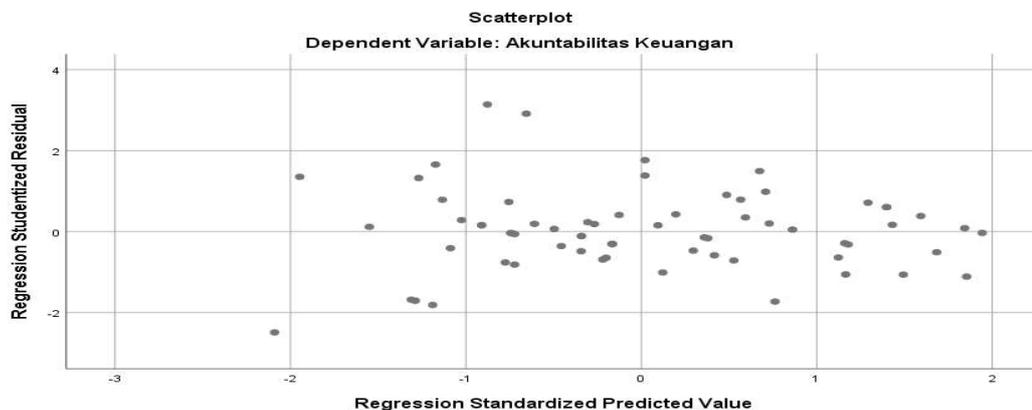
c. Lilliefors Significance Correction.

b. Uji Multikolinieritas

		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
Model		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	,330	3,825		,086	,932		
	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	,396	,094	,420	4,214	,000	,688	1,453
	Transparansi Publik	-,033	,051	-,057	-,645	,521	,877	1,140
	Aktivitas Pengendalian	,533	,111	,462	4,788	,000	,732	1,366

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Keuangan

c. Uji Heteroskedastisitas



5. ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA

a. Uji Signifikansi Parsial (Uji T)

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,330	3,825		,086	,932
	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	,396	,094	,420	4,214	,000
	Transparansi Publik	-,033	,051	-,057	-,645	,521
	Aktivitas Pengendalian	,533	,111	,462	4,788	,000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Keuangan

b. Uji Simultan (Uji F)

Model		ANOVA ^a				
		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	592,598	3	197,533	27,488	,000 ^b
	Residual	459,917	64	7,186		
	Total	1052,515	67			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Keuangan

b. Predictors: (Constant), Aktivitas Pengendalian, Transparansi Publik, Sistem Akuntansi

Keuangan Daerah

c. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,750 ^a	,563	,543	2,681

a. Predictors: (Constant), Aktivitas Pengendalian, Transparansi Publik, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Lampiran 4

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Jumardi
Tempat / Tanggal Lahir : Tawau / 11 Maret 1983
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Telepon / HP : 082291456988
Email : Jumardi.dady83@gmail.com
Status Perkawinan : Kawin
Alamat Rumah : a. Jalan : BTN Puri Mutiara Blok A1 No.1
b. Kelurahan : Simboro
c. Kecamatan : Simboro
d. Kabupaten : Mamuju
e. Provinsi : Sulawesi Barat
Kegemaran (Hobby) : Olahraga (Sepak Bola & Futsal)
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Riwayat Pekerjaan : a. Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dari Tahun 2011 s/d 2016
b. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat dari Tahun 2017 sampai sekarang
Riwayat Pendidikan : a. SD Negeri No. 247 Pinrang Tahun 1995
b. SLTP Negeri 1 Pinrang Tahun 1998
c. SMK Baramuli Pinrang Tahun 2001
d. STIE Muhammadiyah Mamuju Tahun 2018

Makassar, 2021
Yang membuat,

Jumardi
2019MM12230